

**ANALISIS
PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN UPAH
MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
ANTAR WILAYAH DI INDONESIA
TAHUN 2008-2017**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Annisa Berliantika Korining Pertiwi
Nomor Mahasiwa : 15313240
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2019**

ANALISIS
PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
ANTAR WILAYAH DI INDONESIA
TAHUN 2008-2017

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Annisa Berliantika Korining Pertiwi
Nomor Mahasiwa : 15313240
Program Studi : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2019

Penulis,



Annisa Berliantika Korining Pertiwi

PENGESAHAN

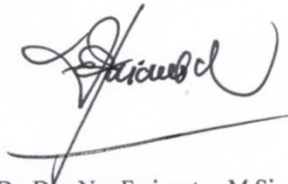
**ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN UPAH MINIMUM
PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA ANTAR WILAYAH DI
INDONESIA TAHUN 2008-2017**

Nama : Annisa Berliantika Korining Pertiwi
Nomor Mahasiswa : 15313240
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 26 Februari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Nur Feriyanto., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, PENANAMAN MODAL ASING, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA ANTAR WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2008-2017

Disusun Oleh : ANNISA BERLIANTIKA KORININGPERTIWI

Nomor Mahasiswa : 15313240

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 7 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Nur Feriyanto, Dr., M.Si

Penguji : Heri Sudarsono, SE.,MEc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTO

-Dream, Believe and Make it Happened-

(Agnéz Mo)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Al Insyirah:5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil aalamiin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat dan Rahmat-Nya kepada kita semua. *Shalawat* serta *sallam* seantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang-benderang ini.

Alhamdulillahirabbil alamin, skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Antar Wilayah Di Indonesia Tahun 2008-2017” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia akhirnya dapat terselesaikan. Tentu dalam menyelesaikan Skripsi ini banyak sekali pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, itu penulis hendak memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah *Subhannahu Wa Ta'aala* yang selalu melimpahkan rahmat-Nya
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua ke jalan yang penuh kebaikan.
3. *My beloved parents* Tri Koriyanto dan (Almh.) Wuwuh Setyo Utaminingsih, yang telah membesarkan dan mendidik saya selama ini. Terimakasih atas segala doa dan semangat yang diberikan selama ini. Terimakasih pula telah menjadi orang tua yang amat demokratis dan *open minded*. Saya sangat beruntung memiliki kalian. Kakak saya yang saya sayangi Annisa Intan Koriningtyas, terimakasih telah memberikan saya “*hight standard*” dalam hidup saya baik secara akademis maupun non akademis. Kepada kedua Eyang Uti saya yang saya sayangi Uti Sri Isngaeni dan Uti Musriatin yang telah menemani saya dan meberikan nasehat baik setiap hari. Dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat.

4. Dr. Drs. Nur Feriyanto., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memotivasi dan memberikan pelajaran yang sangat berharga.
5. Seluruh dosen di program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh rekan Ilmu Ekonomi angkatan 2015, seluruh fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII periode 2016/2017, divisi keilmuan LEM UII 2016/2017, KKN UII angkatan 57 Unit 250, Bung dan Sarinah GMNI Komisariat UII dan GMNI cabang Yogyakarta, teman-teman Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta angkatan 2016, seluruh anggota DPM FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta 2018 dan 2019 yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama masa kuliah.
7. Sahabat BEJATI (Cherry, Anita, Awa, Lulu) yang selalu dapat diandalkan, dengan slogan “*Apa gunanya shabat kalau ngga buat direpotin!*” semoga persahabatan kita selalu terjalin.
8. Sahabat BALAJAER (Torry, Shindi, Amy, Azizah) terimakasih telah memahami kehidupan kuliah *doubleku* dan memastikan absenku aman.
9. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini
Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis ucapkan, semoga Allah *Subhannahu Wa Ta’aala* memberikan limpahan rahmat-Nya aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Februari 2019

Annisa Berliantika Korining Pertiwi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Rata - Rata Lama Sekolah Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Antar Wilayah Di Indonesia Tahun 2008-2017”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi telah mendapat bimbingan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. Jaka Sriyana., M.Si., PhD., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII
3. Dr.Drs. Sahabuddin Sidiq., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UII
4. Dr. Drs. Nur Feriyanto., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing
5. Heri Sudarsono, S.E., M.Ec. Selaku Dosen Penguji
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukan.

Yogyakarta, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
<i>Abstract</i>	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Batasan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tenaga Kerja	16
2.2. Konsep Ketenagakerjaan.....	17

2.2.1	Angkatan Kerja (<i>Labor Force</i>).....	17
2.2.2	Bukan Angkatan Kerja (<i>Unlabor Force</i>)	18
2.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (<i>Labor Force Participation Rate</i>)	19
2.3.	Permintaan Tenaga Kerja	20
2.4.	Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Solow Swan.....	26
2.5.	Upah	26
2.6.	Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP)	28
2.7.	Investasi	29
2.8.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	31
2.9.	Penanaman Modal Asing (PMA)	32
2.10.	Rata-rata Lama Sekolah.....	32
2.11.	Penyerapan Tenaga Kerja	34
2.12.	Penelitian Terdahulu	35
2.13.	Hipotesis Penelitian	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		44
3.1.	Jenis dan Sumber Data	44
3.2.	Metode Pengumpulan Data	45
3.3.	Definisi Operasional	45
3.3.1	Variabel Dependen	45
3.3.1.1	Penyerapan Tenaga Kerja (Y).....	45
3.3.2	Variabel Independen	46
3.3.2.1	Penanaman Modal Asing (PMA).....	46
3.3.2.2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	46

3.3.2.3 Upah Minimum Provinsi (UMP)	47
3.3.2.4 Rata-rata Lama Sekolah.....	47
3.4. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1. Deskripsi Statistik.....	61
4.2. Penentuan Model stimasi Data Panel	64
4.2.1 Uji Chow.....	66
4.2.2 Uji Hausman	68
4.3. Uji Pemilihan Model Regresi	69
4.4. Uji Intercept Antar Provinsi	72
4.5. Uji asumsi Klasik.....	74
4.4.1 Uji Normalitas	75
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	76
4.4.3 Uji Autokorelasi	77
4.4.4 Uji Heterokedastisitas	78
4.6. Estimasi model Regresi	80
4.7. Uji Statistik F (F-test).....	82
4.8. Uji Statistik (T-test).....	83
4.7.1 Penanaman Modal asing (PMA).....	83
4.7.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	83
4.7.3 Rata-rata Lama Sekolah (Rls).....	84
4.7.4 Upah Minimum Provinsi (UMP).....	85
4.9. Koefisien determinasi (R^2)	85
4.10. Intrepretasi hasil Estimasi	86
4.10 Pembahasan Hasil Estimasi	88

4.10.1 Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	89
4.10.2 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	90
4.10.3 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	91
4.10.4 Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Tabel Deskripsi Statistik	62
Tabel 4.2 Tabel Uji Chow	67
Tabel 4.6. Hasil koefisien Per-Provinsi Berdasarkan Estimasi Fix Effect..	73
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	2
Gambar 1.2. Diagram Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran.....	5
Gambar 1.3 Realisasi Investasi dalam negeri Indonesia tahun 2008-2017.....	7
Gambar 1.4 Rata-Rata Upah Minimum Provinsi	10
Gambar 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Di Indonesia.....	11
Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja	21
Gambar 2.2 Kurva Nilai Produk Marginal.....	23
Gambar 2.3 Pergeseran Kurva Tenaga Kerja	25
Gambar 4.3 Hasil Uji Hausman	69
Gambar 4.4 Hasil Uji MWD Pada Z1	70
Gambar 4.5 Hasil Uji MWD Pada Z2	71
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas	73
Gambar 4.9 Hasil Uji Herokedastisitas	77
Gambar 4.10 Hasil Regresi	79

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Deskripsi Statistik.....	97
2. Lampiran Hasil Uji MWD Z1	98
3. Lampiran Hasil uji MWD Z2	99
4. Lampiran Uji Asumsi Klasik	100
5. Lampiran Uji Chow	102
6. Lampiran Uji Hausman	102
7. Lampiran Data.....	104

ABSTRACT

The successful achievement of a nation can be measured by how country can solve the problem being faced. Indonesia is a country with a large number of population in the world. Data from the World Bank in 2017 shows that Indonesia's population is 264 million. This is of course can be a potency and also the problem for the country. Employment is an important factor in supporting economic development. The purpose of this study is to analyze the impact of investment (foreign investment and domestic investment), mean years school, and provincial minimum wage on labor absorption in Indonesia. This study used a panel data from 33 provinces in Indonesia during period 2008-2017. The model that used in this study is fixed effect model. The results of the study show that Foreign Investment has positive and significant influence on labor absorption, while Domestic Investment has not significant effect on labor absorption, the mean years school has positive and significant effect on labor absorption, and the Provincial Minimum Wage has a positive and significant influence on labor absorption.

Keywords: *panel data, fixed effect, labor absorption, minimum wage, investment, mean years school*

ABSTRAK

Keberhasilan suatu negara salah satunya dikur dengan sejauh mana negara tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang besar di dunia. Data *World bank* pada 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 264 Juta jiwa. Hal ini tentu merupakan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi oleh negara-negara berkembang untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Investasi (Penanaman modal asing dan Penanaman Modal dalam negeri), rata-rata lama sekolah (rls), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *panel* 33 Provinsi di Indonesia selama periode 2008-2017. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: data panel, fix effect, penyerapan tenaga kerja, upah minimum, investasi, rata-rata lama sekolah.

BAB I

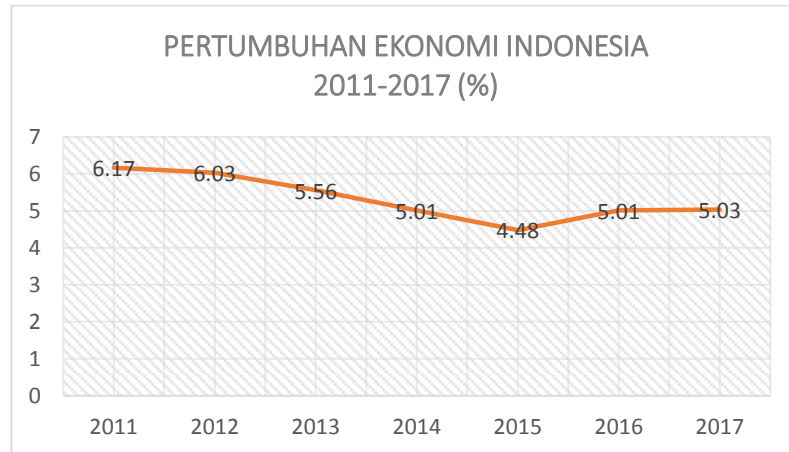
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk besar di dunia. Menurut data *World Bank*, Indonesia menduduki posisi empat dunia dalam hal jumlah penduduk dibawah Amerika Serikat, China dan India. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 264 juta jiwa.

Sempat mengalami masa sulit pada masa krisis ekonomi pada 1998, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berangsur membaik. Menurut *world bank*, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi sebesar 5,5 persen sejak tahun 2000. Capaian pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5 persen tersebut juga menuai pujian dari berbagai pihak dalam forum APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Indonesia sendiri telah berhasil menjadi satu dari anggota negara-negara yang memiliki ukuran ekonomi terbesar di dunia atau yang disebut dengan G20. Bahkan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen pada tahun 2016, performa ekonomi Indonesia sendiri merupakan peringkat ketiga dari seluruh negara anggota G20 (Gumelar, 2017).

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: Bps.go.id (diolah)

Dari gambar 1.1 mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas dapat diketahui bahwa Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 2015 sebesar 4,88 persen dan meningkat pada tahun 2016 mencapai 5,05 persen dan pada 2017 naik lagi sebesar 5.03 persen. Peningkatan tenaga kerja produktif merupakan usaha meningkatkan pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang mana merupakan prioritas utama dari Indonesia. Hal tersebut karena, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi sekaligus tantangan bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia juga tengah memasuki masa bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana penduduk usia produktif berjumlah lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non-produktif. Negara Indonesia

memiliki populasi penduduk muda sekitar setengah dari total penduduk Indonesia. Jika menilik dari potensi di atas, indikasinya Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar. Apabila di telaah, semua upaya pembangunan selalu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, dan menurunkan angka pengangguran di masyarakat. Sementara itu, dilihat dari sisi ekonomi, kesejahteraan penduduk ditentukan oleh kondisi distribusi sumber daya seperti modal, lahan, kesempatan kerja, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, di mana suatu negara harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global agar dapat menciptakan pembangunan yang berhasil.

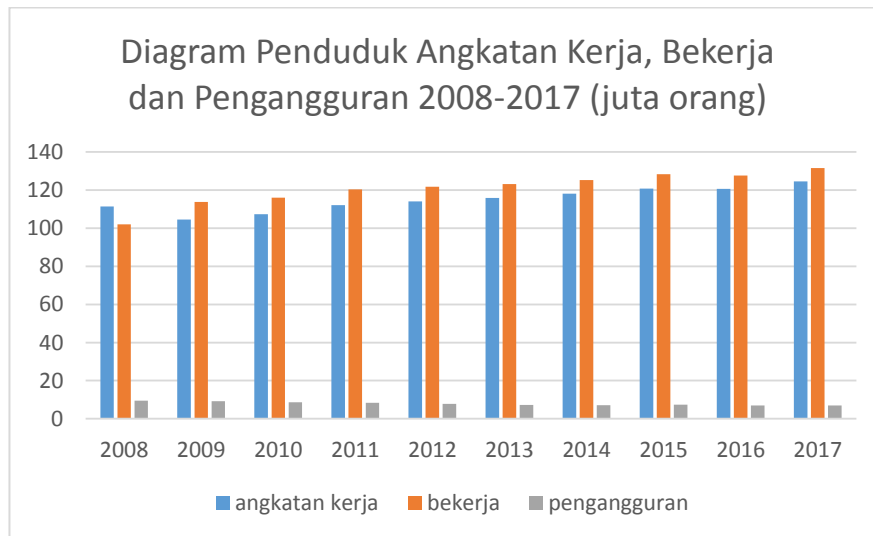
Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi di setiap negara di mana tenaga kerja sering menjadi prioritas dalam pembangunan suatu negara. Bahkan ketika pra-pemerintahan suatu negara, calon penguasa sering mengkampanyekan tentang peningkatan lapangan kerja sebagai “senjata ampuh” untuk memenangkan pemilihan umum. Beberapa alasan tersebut memang cukup logis mengingat penyerapan tenaga kerja menimbulkan beberapa dampak yang lain seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat melalui upah yang didapat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengantisipasi masalah sosial lainnya. Penyerapan tenaga kerja atau biasa disebut sebagai *pro-job* menjadi agenda penting selain *pro-poor*

(pengentasan kemiskinan), dan *pro-growth* (peningkatan pertumbuhan) (Kuncoro, 2012).

Di dalam teori Cobb Douglas, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal dari peningkatan input tenaga kerja, modal, dan teknologi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara sering menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan sehingga diharapkan dapat memicu pertumbuhan penyerapan input produksi salah satunya tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena permintaan dari tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan output. Sehingga secara logika terjadi pergerakan yang sama antara pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan permintaan output dengan penyerapan tenaga kerja.

Jika melihat dari perspektif output, tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tenaga kerja memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upah (balas jasa dari faktor produksi tenaga kerja) yang mana akhirnya akan menurunkan kemiskinan serta mengatasi masalah sosial (Kuncoro, 2012). Permintaan dan penawaran tenaga kerja dipengaruhi terhadap tingkat investasi, pendidikan, tingkat ekspor dan impor, dan juga pendapatan asli daerah.

Gambar 1.2. Diagram Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran



Sumber: Bps.go.id

Berdasarkan gambar 1.2 di atas digambarkan penduduk angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan penduduk yang pengangguran. Dari data tersebut dapat dicermati bahwa tren penduduk yang bekerja dari tahun 2008-2017 mengalami peningkatan, dan jumlah pengangguran dari tahun 2008-2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun, dari data di atas peningkatan jumlah penduduk yang bekerja diikuti juga dengan peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja, sehingga masih menimbulkan jumlah pengangguran yang cukup tinggi, Meskipun jumlah pengangguran yang ada mengalami tren penurunan. Hal ini berarti pemerintah masih harus melakukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan jumlah pengangguran. Kebijakan tersebut diantaranya adalah dengan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja yang ada tidak terlepas dari jumlah investasi yang ada di Indonesia.

Istilah investasi maupun penanaman modal merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat. Investasi memiliki pengertian lebih luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tak langsung (*portofolio investment*). Penanaman modal menurut Pasal 1 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

Penciptaan lapangan pekerjaan ini erat kaitannya dengan investasi swasta. Investasi swasta memainkan peran yang sangat penting dan positif bagi kemajuan dan kemakmuran suatu negara. Banyak negara mengandalkan investasi swasta untuk memecahkan masalah ekonomi seperti kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Investasi swasta akan menciptakan akumulasi modal yang digunakan untuk membangun usaha baru dan/atau melakukan perbaikan pada usaha yang telah berjalan. Hal ini akan menimbulkan beberapa keuntungan antara lain: meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, meningkatkan pendapatan individu, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Haroon,2011). Akan tetapi, penelitian empiris selama ini belum menunjukkan hasil yang konsisten mengenai hubungan investasi swasta dengan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 1.3 Realisasi Investasi dalam negeri Indonesia tahun 2008-2017



Sumber: Bps.go.id

Berdasarkan gambar 1.3 di atas diketahui bahwa realisasi investasi dalam negeri di Indonesia dari tahun 2008-2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di mana dapat diketahui dari tahun 2008 realisasi investasi dalam negeri di Indonesia sebesar Rp.20363.4 miliar kemudian terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2017 realisasi investasi dalam negeri di Indonesia sebesar Rp.262350.5 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah realisasi investasi.

Selain investasi yang berasal dari dalam negeri ada pula investasi yang berasal dari luar negeri, yang juga turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui investasi asing juga gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Era Presiden Joko Widodo ini (Burhani, 2018). Melalui cara investasi ini diharapkan efektif untuk meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

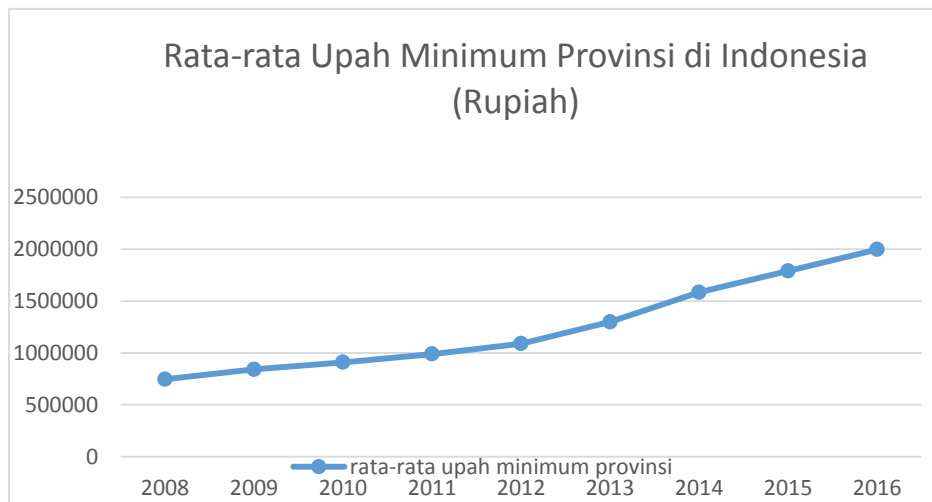
Umumnya jika dilihat dari studi penanaman modal asing, motif utama suatu perusahaan asing menanamkan modalnya di negara tertentu didasari oleh

motif mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari beberapa faktor yang berkaitan dengan faktor produksi seperti upah buruh yang lebih rendah, akses terhadap bahan baku yang lebih mudah, pasar baru yang lebih luas, serta adanya insentif untuk investor dan status khusus negara tertentu dalam perdagangan Internasional. Sementara bagi negara penerima modal, berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.

Dalam pasar tenaga kerja jumlah tenaga kerja yang ditawarkan maupun jumlah tenaga kerja yang diminta secara sektoral maupun secara keseluruhan akan menciptakan struktur upah tertentu. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999, yang mengatur mengenai upah minimum, dan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001 memberikan wewenang kepada pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menetapkan upah minimumnya sendiri. Terdapat banyak studi mengenai upah minimum dan adanya kenaikan upah minimum justru menjadi topik yang penting serta efek tenaga kerja/pengangguran terhadap upah minimum masih menjadi suatu masalah penting (Brown, 1982).

Dalam pembangunan ekonomi pengakuan standar hidup minimum mencakup tidak hanya penciptaan lapangan pekerjaan, namun juga penciptaan upah yang memenuhi standar kebutuhan hidup layak di masyarakat (Leigh, N.G. dan Blakely, 2016). Dampak upah minimum bagi penyerapan tenaga kerja tetap berlanjut menjadi fokus utama dalam penelitian tentang pasar tenaga kerja.

Gambar 1.4 Rata-Rata Upah Minimum Provinsi



sumber: bps.go.id

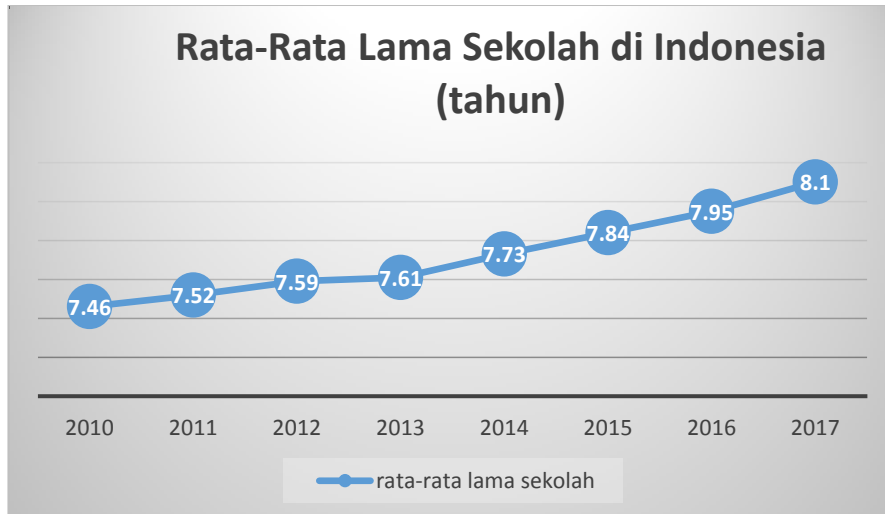
Berdasarkan gambar 1.4 di atas diketahui bahwa rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia dari tahun 2008-2016 terus mengalami peningkatan secara nominal. Hal ini tentu memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Dalam pasar tenaga kerja, upah merupakan harga tenaga kerja (Hubbard et al., 2014). Sehingga upah dalam hal ini haruslah mencerminkan apa yang telah diberikan pekerja pada pihak yang mempekerjakannya. Di mana pekerja dalam hal ini telah memberikan kontribusi berupa keahlian maupun keterampilan yang dimilikinya.

Dalam beberapa literatur mengenai ketenagakerjaan, tingkat pendidikan formal merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan seorang tenaga kerja secara profesional, sebab tingkat keterampilan tenaga kerja umumnya sulit untuk diidentifikasi ataupun diukur (Borghans, 2001). Dalam hal ini tingkat pendidikan juga turut mempengaruhi bagaimana kualitas

tenaga kerja yang terserap dalam perekonomian (Atmanti, 2005). Indikator untuk pendidikan ini dapat dilihat melalui angka rata-rata lama sekolah.

Gambar 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Di Indonesia



Sumber: bps.go.id

Dari gambar 1.5 di atas rata-rata lama sekolah di Indonesia mengalami peningkatan, pada tahun 2017 rata-rata masyarakat Indonesia bersekolah selama 8.1 tahun di mana meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2016 dengan rata-rata lama sekolah 7.95 tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat bahwa Indonesia sedang mengalami perkembangan jumlah penyerapan tenaga kerja yang cukup baik dari tahun ke tahun, namun demikian jumlah angkatan kerja di Indonesia juga mengalami kenaikan. Jika dilihat dari sisi investasi di Indonesia baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri yang mengalami kenaikan pula, indikator lain seperti upah minimum provinsi yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, juga angka rata-rata lama sekolah yang mengalami kenaikan. Begitu menarik nampaknya untuk mencermati fenomena ini, untuk itu penulis

dalam penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA ANTAR WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2008-2017 “**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia tahun 2008-2017?
- 1.2.2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia tahun 2008-2017?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia tahun 2008-2017?
- 1.2.4. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia tahun 2008-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian kali ini adalah:

- 1.3.1. Mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia tahun 2008-2017
- 1.3.2. Mengetahui pengaruh Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia tahun 2008-2017
- 1.3.3. Mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia tahun 2008-2017
- 1.3.4. Mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia tahun 2008-2017

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Memperkaya penelitian empiris variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja
- 1.4.2. Menjadi bahan acuan atau landasan bagi penelitian selanjutnya khususnya untuk penelitian yang berkaitan tentang tenaga kerja atau ketenagakerjaan
- 1.4.3. Menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu ekonomi khususnya tentang tenaga kerja
- 1.4.4. Sebagai sarana berpendapat secara ilmiah untuk berbagai instrumen kebijakan yang terkait dengan tenaga kerja

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada rentang waktu tahun 2008-2017 hal ini dilakukan berkaitan dengan aktualitas dan ketersediaan data penelitian. Pemilihan 33 provinsi di Indonesia juga berkaitan dengan ketersediaan data penelitian, provinsi Kalimantan Utara tidak dimasukkan dalam penelitian sebab Provinsi ini baru berdiri pada tahun 2013 sedangkan data penelitian yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah dari tahun 2008-2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rata-rata lama sekolah, dan upah minimum 33 provinsi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja Menurut UU no.13 tahun 2003 pasal 1 merupakan setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarganya yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur karena tidak ada kesempatan kerja. Menurut BPS seseorang dikategorikan sebagai tenaga kerja ketika berumur 15 tahun ke atas.

Tenaga kerja sebagai sumber daya dapat diartikan menjadi dua pengertian, yang pertama diartikan sebagai usaha kerja yang dapat diberikan kepada proses produksi. Pengertian ini sering disebut dengan aspek kualitas, dimana sumberdaya manusia ini mencerminkan kualitas usaha seseorang dalam menghasilkan barang atau jasa dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah aspek kuantitas, yakni sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha tersebut. Dengan kata lain orang yang dalam usia kerja dianggap

mampu bekerja. Sehingga kelompok penduduk dalam usia kerja disebut tenaga kerja. (Simajuntak,1985)

Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat memerlukan penciptaan kesempatan kerja yang luas, apabila pertumbuhan angkatan kerja tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja maka akan mengakibatkan beban dalam perekonomian. Sebab jika kesempatan kerja lebih kecil daripada penawaran tenaga kerja maka, sebagian angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan akan menjadi pengangguran. (Kusendi,2003)

2.2. Konsep Ketenagakerjaan

Dalam konsep ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, diantaranya adalah:

2.2.1. Angkatan Kerja (*Labor Force*)

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang berkerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (Nur Feriyanto, 2014). Sehingga angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat maupun yang berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Angkatan kerja masuk kategori bekerja apabila minimum bekerja selama 1 jam selama seminggu lalu untuk kegiatan produktif. Pencari kerja merupakan seseorang yang memiliki kegiatan utama sedang mencari pekerjaan selama minimal 1 jam selama minggu yang lalu. Angkata kerja dapat diformulasikan secara matematis sebagai berikut: $AK=K+MP$

Angkatan kerja (AK) merupakan penjumlahan antara penduduk yang kegiatannya selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (MP). Dalam bahasa ekonomi penjumlahan angkatan kerja disebut sebagai penawaran tenaga kerja (*labor supply*). Sementara penduduk yang memiliki status sebagai pekerja atau tenaga kerja termasuk dalam sisi permintaan tenaga kerja (*labor demand*).

2.2.2. Bukan Angkatan Kerja (*Unlabor Force*)

Menurut Payaman J. Simanjuntak, kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari tiga golongan, yakni: (1) golongan yang masih bersekolah, yaitu mereka yang kegiatannya hanya atau terutama bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah, (3) golongan lain-lain, yang tergolong lain-lain dalam hal ini adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi tetapi memperoleh penghasilan seperti pensiunan, penerima bunga atas simpanan atau sewa atas milik, dan juga mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain karena lanjut usia, cacat, dalam penjara maupun seseorang yang sakit kronis.

Sehingga bukan angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun teatas, namun kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lainnya. Seseorang yang bersekolah namun dalam seminggu yang lalu bekerja selama 1 jam dikategorikan juga sebagai bukan angkatan kerja, karena pekerjaan utamanya adalah sekolah. Kelompok bukan angkatan kerja (BAK) ini juga disebut sebagai *potential labor force* atau tenaga kerja potensial, sebab sewaktu-waktu dapat terjun untuk ikut bekerja.

2.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labor force participation rate*)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase yang menunjukkan besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Untuk mengukur TPAK dapat digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = (\text{AK}/\text{PUK}) \times 100\%$$

Besar kecilnya TPAK dapat dipengaruhi oleh (a) Komposisi angkatan kerja (AK) dan penduduk usia kerja (PUK). (b) Tingkat pendidikan penduduk, dimana jika banyak penduduk yang memilih untuk bersekolah maka tingkat TPAK akan kecil. (c) Jumlah penduduk yang memilih menjadi ibu rumah tangga. (d) Pendapatan rumah tangga, yakni apabila pendapatan rumahtangga rendah maka akan mendorong anggota keluarga untuk bekerja sehingga menambah jumlah AK akibatnya TPAK naik. (e) Budaya yang melarang wanita untuk bekerja, jika budaya penduduk melarang wanita untuk bekerja maka jumlah AK rendah sehingga TPAK juga rendah. (Nur Feriyanto, 2014)

2.2.4. Tingkat Pengangguran (*unemployment rate*)

Tingkat pengangguran merupakan angka yang menunjukkan banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak dapat bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran (TP) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = (MP/AK) \times 100\%$$

Tingkat pengangguran (TP) merupakan persentase antara jumlah orang yang sedang mencari kerja (MP) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (AK). Jumlah orang yang bekerja tergantung pada besarnya permintaan pekerja dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Permintaan terhadap tenaga kerja ini dipengaruhi oleh tingkat upah. Jumlah orang yang bekerja (*employment rate*) dipengaruhi oleh jumlah penyediaan dan permintaan tersebut, sedangkan besarnya ketersediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi tingkat upah.

2.3. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh perusahaan untuk dipekerjakan (Arfida, 2003). Menurut Simajuntak (2001), permintaan tenaga kerja menjelaskan seberapa banyak perusahaan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada periode tertentu. Permintaan tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang atau jasa. Pertambahan tenaga kerja tergantung pada permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang diproduksinya, sebab pengusaha mempekerjakan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual kepada konsumen. Dengan demikian, permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan.

Menurut Sumarsono (2009) permintaan terhadap tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Perubahan Tingkat Upah

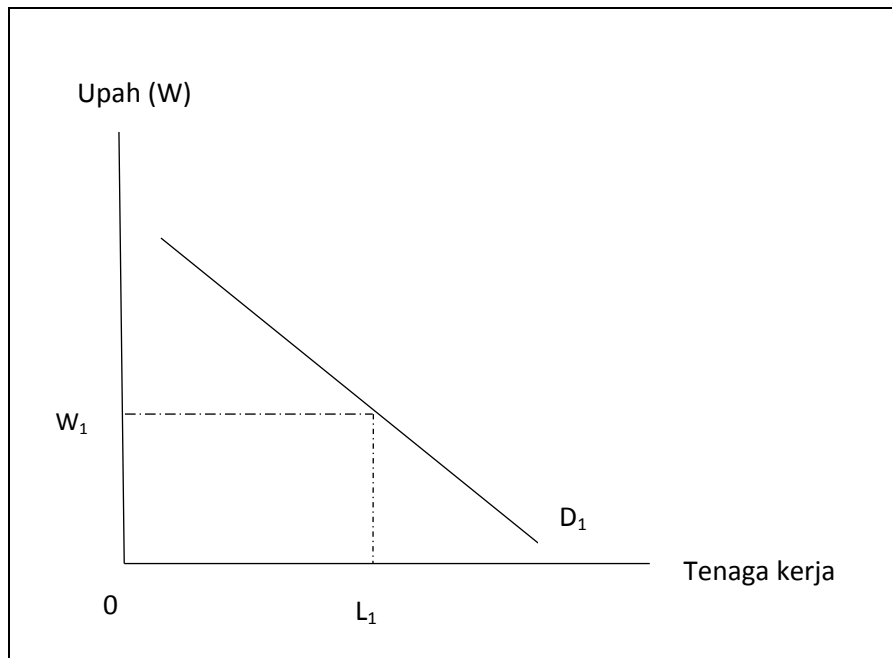
Apabila tingkat upah naik maka akan meningkatkan biaya produksi dengan demikian harga produk per-unit akan mengalami kenaikan pula, akibatnya konsumen merespon dengan mengurangi konsumsi produk tersebut. Karena terjadi penurunan konsumsi maka produsen menurunkan produksi produknya, akibatnya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut akan berkurang. Penurunan jumlah tenaga kerja ini disebut dengan efek skala produksi.

Apabila upah naik namun harga faktor produksi selain tenaga kerja tidak mengalami kenaikan maka produsen akan cenderung memilih menggunakan teknologi atau berproduksi dengan padat modal daripada padat karya. Akibatnya terjadi alih daya yang semula produksi dilakukan oleh tenaga kerja kemudian sekarang dilakukan oleh mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja ini disebut dengan efek substitusi.

b. Perubahan Permintaan Pasar

Apabila permintaan pasar terhadap produk yang diproduksi oleh perusahaan mengalami peningkatan maka produsen akan merespon dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja.

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja



Sumber: Payaman J. Simajuntak, 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.

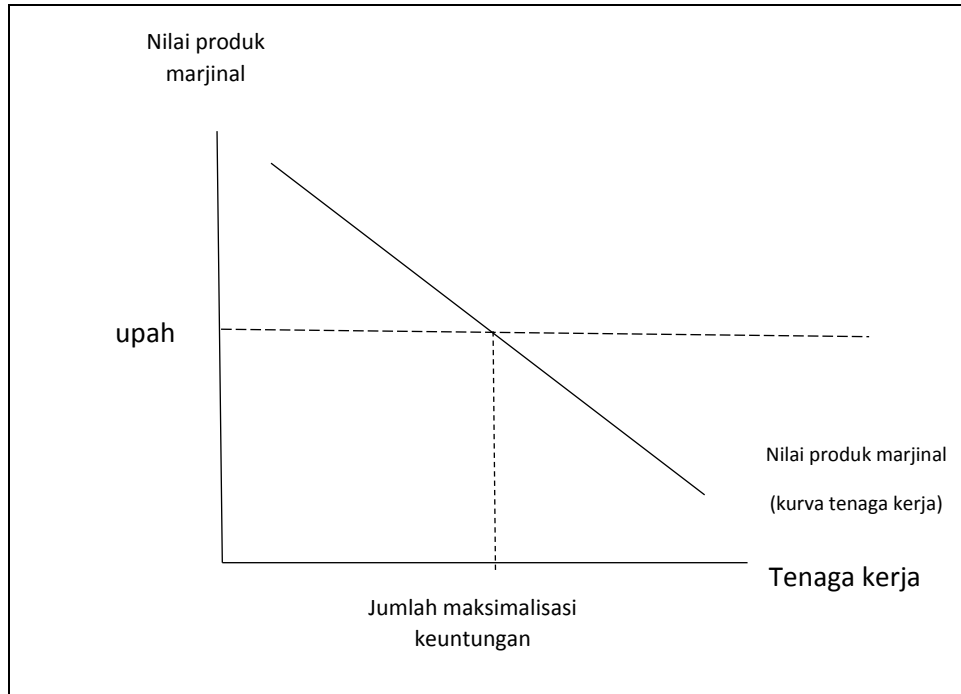
Gambar 2.1 menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja, dimana W menggambarkan tingkat upah dan L menggambarkan jumlah tenaga kerja. Dalam kurva tersebut digambarkan harga maksimum yang akan dibayarkan perusahaan dalam berbagai alternatif jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan produk marginal tenaga kerja (Mankiw, 2006). Pada permintaan tenaga kerja, tingkat upah dilihat dari nilai produk marginal. Nilai produk marginal adalah produk marginal dari suatu input dikalikan dengan harga hasil produksi di pasar, maka persamaannya adalah sebagai berikut:

$$VMPL (\text{upah}) = MPL \times P$$

Dimana VMPL adalah nilai produk marginal, MPL adalah marginal produk tenaga kerja (peningkatan jumlah hasil produksi dari satu unit tenaga kerja), sedangkan P merupakan harga produk.

Gambar 2.2 Kurva Nilai Produk Marginal



Sumber: Payaman J. Simajuntak, 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.

Gambar 2.2 menggambarkan mengenai grafik nilai produk marginal. Dalam gambar di atas, kurva menurun akibat produk marginal tenaga kerja yang berkurang ketika jumlah tenaga kerja meningkat. Garis horizontal menggambarkan upah. Dari ilustrasi gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk memaksimalkan keuntungan, suatu perusahaan akan terus menambah jumlah tenaga kerja hingga mencapai pada titik dimana kurva berpotongan. Daerah dibawah tingkat ini menggambarkan nilai produk maginal yang lebih besar daripada upah, sehingga menambah tenaga kerja akan meningkatkan keuntungan. Sedangkan daerah di atas tingkat ini menggambarkan nilai produk marginal yang lebih kecil

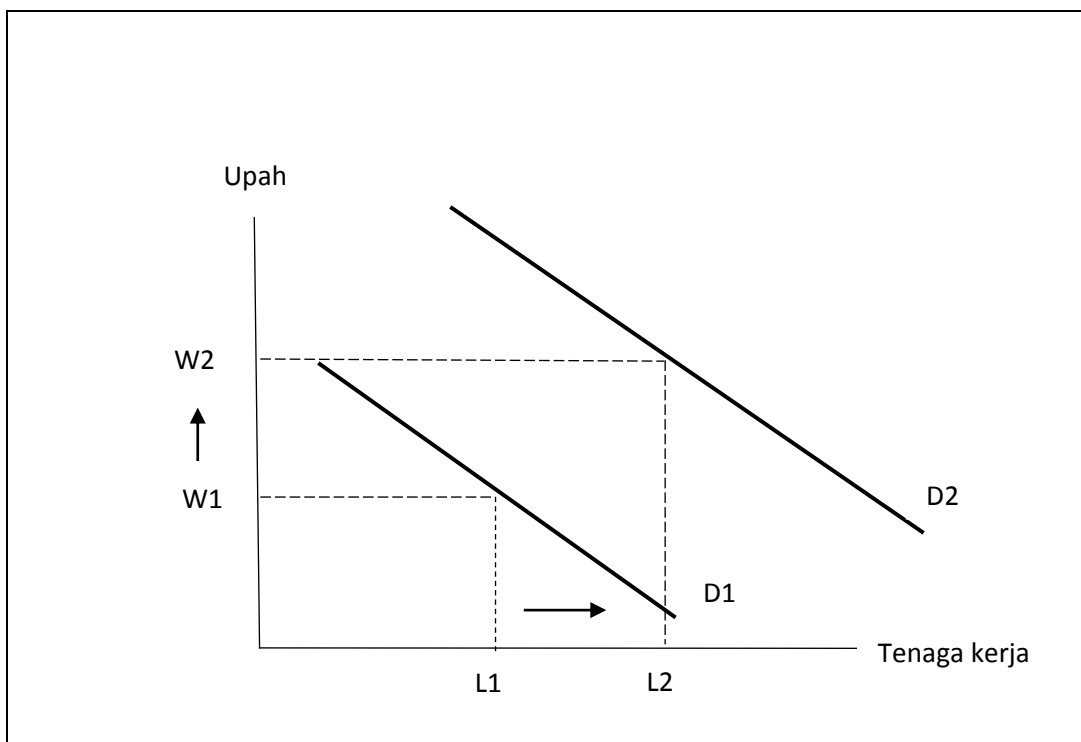
daripada upah, sehingga menambah tenaga kerja tidak akan menguntungkan perusahaan. Dari ilustrasi gambar 2.2 di atas dapat disimpulkan jika perusahaan kompetitif akan menambah jumlah tenaga kerja hingga titik dimana nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan tingkat upah.

Dalam teori neo-klasik produsen tidak dapat mempengaruhi harga, namun pengusaha dapat mengatur jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk memaksimalkan laba. Fungsi permintaan akan pekerja dalam suatu perusahaan dapat didasarkan pada:

- a. Tambahan hasil marginal yakni tambahan hasil output yang diproduksi ketika menambah seorang pekerja . Umumnya disebut dengan *Marjinal Physical Produk* (MPPL)
- b. Permintaan marginal yakni jumlah pendapatan yang diperoleh pengusaha ketika mendapatkann tambahan hasil marginal tersebut, umumnya disebut dengan *Marjinal Revenue* (MR). Permintaan Marjinal (MR) merupakan besarnya tambahan hasil dikalikan dengan harga per unit.
- c. Biaya marginal, merupakan biaya yang dikeluarkan pengusaha ketika mempekerjakan tambahan satu orang pekerja. Apabila biaya marginal ini nilainya lebih rendah daripada penerimaan marginal artinya pertambahan jumlah pekerja tersebut memberikan keuntungan bagi pengusaha. Namun demikian, apabila biaya marginal ini nilainya lebih tinggi daripada penerimaan marginal,

maka penambahan jumlah pekerja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut justru merugikan perusahaan.

Kurva permintaan terhadap tenaga kerja dapat bergeser, menurut manikw (2006), hal-hal yang dapat menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser ada beberapa faktor yaitu: harga hasil produksi, perubahan teknologi, dan penawaran faktor-faktor produksi lainnya.



Gambar 2.3 Pergeseran Kurva Tenaga Kerja

Sumber: Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*.

Permintaan akan suatu produk yang meningkat akan mengakibatkan harga produk tersebut mengalami kenaikan. Peningkatan harga ini akan mengubah produk marginal tenaga kerja untuk jumlah tenaga kerja berapa pun, namun meningkatkan nilai produk marginalnya. Sehingga apabila harga produk mengalami kenaikan, maka menambah jumlah tenaga kerja merupakan hal yang menguntungkan.

Gambar 2.2 di atas menggambarkan mengenai pergeseran kurva tenaga kerja, ketika permintaan terhadap tenaga kerja mengalami pergeseran dari D1

menjadi D2, upah mengalami peningkatan yakni dari W1 ke W2, sedangkan jumlah tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari L1 ke L2. Pergeseran kurva tersebut di atas menjelaskan bahwa upah dan nilai produk tenaga kerja mengalami pergeseran secara bersama-sama sehingga kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke arah kanan. Demikian pula sebaliknya, apabila harga produk menurun, maka akan mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke arah kiri.

Fungsi permintaan tenaga kerja merupakan fungsi yang menjelaskan hubungan antara perubahan tingkat upah tenaga kerja yang dibayarkan dengan jumlah tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan kemungkinan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

2.4. Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Solow Swan

Dalam teori ini, pertumbuhan tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi yakni penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. Teori ini berdasar pada analisis ekonomi klasik yaitu perekonomian berada pada tingkat *full employment* dan pada tingkat *full utilization* dari faktor-faktor produksinya. Artinya perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila terjadi perkembangan jumlah penduduk, akumulasi capital dan kemajuan teknologi. Dalam teori Solow Swan ini, kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap pertumbuhan perekonomian. (Arsyad, 2010)

2.5. Upah

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh sebab itu upah haruslah cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur berdasarkan kebutuhan hidup minimum (Simanjuntak,1985). Pengertian upah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Bab I Pasal 30 Ayat 1 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang akan dilakukan.

Pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan kepada tiga fungsi upah (Sumarsono, 2003):

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, artinya upah yang diberikan kepada pekerja haruslah dapat mencukupi kebutuhan pekerja sesuai dengan standar minimum kebutuhan hidup.
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, upah yang diberikan kepada pekerja haruslah sesuai dengan produktifitas tenaga kerja itu sendiri.
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas tenaga kerja, artinya upah yang diberikan kepada tenaga kerja hendaknya dapat menjadi pendorong agar pekerja lebih produktif lagi dalam memproduksi barang atau jasa.

Menurut BPS upah yang diberikan kepada pekerja dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan, dan Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pemberian upah tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung (Sulistiawati, 2012):

- a. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
- b. Peraturan Undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja
- c. Produktivitas marginal tenaga kerja
- d. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha
- e. Perbedaan jenis pekerjaan.

2.6. Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP)

Berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 maka upah pekerja disebut UMR atau UMP. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah tingkat Provinsi dan Bupati atau Walikota untuk daerah tingkat Kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi atau Kabupaten/kota.

Kebijakan upah minimum di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para pekerja. Penetapan upah minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun.

Beberapa variabel yang digunakan untuk menilai kelayakan UMP atau UMR diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup minimum pekerja (Nur Feriyanto, 2014). Sementara menurut Sumarsono (2009) ada tiga komponen dalam penetapan upah minimum yaitu kebutuhan fisik minimum, indeks harga konsumen, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 13 tahun 2012 faktor faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum adalah :

- a. Nilai Kebutuhan Kehidupan Layak (KHL)
- b. Produktifitas makro (perbandingan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja di periode yang sama)
- c. Pertumbuhan Ekonomi (Nilai PDRB)
- d. Kondisi pasar tenaga kerja (perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama)
- e. Kondisi usaha yang tidak mampu (marginal), ditunjukkan oleh
- f. Perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode yang sama.

Penetapan upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuainya lagi penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Penetapan Upah minimum di setiap provinsi berbeda-beda besarnya, karena tingkat kebutuhan hidup di setiap provinsi berbeda.

2.7. Investasi

Investasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian dimana investasi akan memunculkan peluang perluasan usaha bagi pelaku ekonomi, selain itu investasi juga memberikan sarana untuk memperbaiki alat-alat produksi yang akibatnya dapat meningkatkan output produksi, peningkatan output produksi ini berimplikasi terhadap perluasan kesempatan kerja sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan semakin besar.

Dalam teori ekonomi investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan atau untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Menurut Sukirno (2001) investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelajaran penanaman modal oleh suatu perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi

untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Menurut Dumairy (1996) investasi adalah penambahan barang modal secara *netto positif*. Seseorang yang membeli bahan modal namun ditujukan untuk mengganti (*replacement*). Pembelian barang modal tersebut merupakan investasi untuk masa yang akan datang.

Investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi sendiri dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta atau kerjasama keduanya. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakat negara tersebut (Mankiw, 2003). Secara teori peningkatan investasi akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan perkapita sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya kenaikan investasi maka mendorong volume perdagangan dan volume produksi.

Di Indonesia sendiri investasi mulai dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan Undang-undang No.6 tahun 1968 tentang penanaman modal

dalam negeri (PMDN). Saat ini, kedua Undang-undang tersebut telah dilengkapi dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No.11 tahun 1970 tentang PMA dan Undang-Undang No.12 tahun 1970 tentang PMDN.

Dalam investasi ada beberapa faktor yang menentukan investasi itu sendiri, faktor tersebut antara lain (Sukirno,2001) :

- a. Tingkat bunga, apabila tingkat bunga tabungan nilainya lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh seseorang/ suatu perusahaan dalam investasi maka besar kemungkinan pengusaha tersebut akan memilih untuk tidak berinvestasi dan membungakan uangnya saja.
- b. Ramalan mengenai kondisi yang akan datang, apabila kondisi yang akan datang diramalkan akan ada keuntungan yang besar jika investasi dilakukan maka seseorang atau suatu perusahaan akan cenderung memilih untuk investasi. Namun sebaliknya jika kondisi yang akan datang diramalkan investasi kurang menguntungkan maka seseorang atau suatu perusahaan akan memilih untuk tidak melakukan investasi.

2.8. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Disebut juga dengan *domestik Investment* (Investasi Dalam Negeri), merupakan penanaman modal didalam negeri, artinya penanaman modal dari negeri sendiri yang berinvestasi di dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan modal

dalam negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha. Penanaman modal dalam negeri juga dapat didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

2.9. Penanaman Modal Asing (PMA)

Dikenal dengan *Foreign Investment* (Investasi Asing), artinya investasi yang diperoleh dari luar negeri untuk digunakan didalam negeri guna mengoptimalkan sumber daya yang masih belum termanfaatkan. Penanaman modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2.10. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*means year of schooling*) merupakan sebuah angka yang menunjukkan rata-rata waktu yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan pembelajaran formal/bersekolah. Nilai rata-rata lama sekolah yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. (www.bps.go.id)

Tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang, dipegaruhi dari beberapa faktor yakni faktor pasar dan faktor non-pasar. Secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Secara umum terdapat dua hal yang paling berpengaruh terhadap

tingkat pendidikan yang diinginkan dari sisi permintaan. Yang pertama adalah harapan bagi seseorang untuk lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang bagi dirinya maupun keluarganya. Yang kedua adalah biaya pendidikan yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus seseorang itu tanggung selama menempuh pendidikan tersebut (Todaro, 2006)

Human capital sangat berperan dalam ekonomi terutama di bidang pendidikan, karena permintaan tenaga kerja sangat membutuhkan keahlian tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2015). Pendidikan dapat menyediakan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang membuat tenaga kerja lebih produktif baik dalam proses produksi maupun dalam teknologi produksi suatu barang. Penurunan kesempatan kerja bagi penduduk yang tidak terdidik mendorong setiap penduduk untuk melindungi prospek hidupnya dengan cara menempuh pendidikan dari tingkat dasar hingga tamat (Todaro, 2006). Selanjutnya untuk menjaga kesempatan seseorang dapat terserap kedalam lapangan pekerjaan yang ada, seseorang akan cenderung untuk melanjutkan pendidikannya hingga ke tingkat tertinggi.

Dalam penelitian ini indikator pendidikan yang dipakai untuk diketahui pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja adalah angka rata-rata lama sekolah. Dimana angka rata-rata lama sekolah ini mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pendidikan. Dengan semakin banyaknya tahun yang dihabiskan seseorang dalam menempuh pendidikan, diasumsikan pengetahuannya akan semakin banyak pula. Sehingga dengan banyaknya pengetahuan seseorang

maka seseorang tersebut akan lebih produktif. Perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja dengan tingkat pengetahuan yang lebih baik karena lebih produktif.

2.11. Penyerapan Tenaga Kerja

Penduduk yang terserap dalam lapangan pekerjaan tersebar di berbagai sektor perekonomian, setiap sektor perekonomian memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda, sehingga kemampuan menyerap tenaga kerja juga berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor, selain itu secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional. (Simanjuntak, 1985).

Dalam memproduksi barang atau jasa, upah merupakan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen sebagai balas jasa terhadap tenaga kerja dalam kegiatan produksi yang dilakukannya. Apabila upah tenaga kerja mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi harga per-unit dari produk yang diproduksi, akibatnya permintaan terhadap produk tersebut menurun, penurunan permintaan akan produk tersebut mengakibatkan penurunan produksi. Yang mana hal ini mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dalam perusahaan tersebut.

Penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh investasi, dimana adanya investasi berguna untuk meningkatkan jumlah produksi. Apabila investasi yang ada oleh perusahaan kemudian dialokasikan untuk menambah faktor produksi tenaga kerja maka penyerapan terhadap tenaga kerja akan meningkat. Namun

apabila investasi yang ada dialokasikan untuk menambah mesin-mesin dalam proses produksi maka justru akan mengurangi penyerapan terhadap tenaga kerja.

Angka rata-rata lama sekolah mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pendidikan. Dapat diasumsikan bahwa apabila seseorang lebih banyak tahun dalam suatu institusi pendidikan maka pengetahuan yang didapatkan seseorang tersebut akan cenderung lebih baik, artinya dengan pengetahuan yang lebih baik maka produktifitas seseorang tersebut akan meningkat. Dengan demikian semakin lama jumlah rata-rata lama sekolah akan semakin tinggi penyerapan tenaga kerja.

2.12. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Feriyanto dan Jaka Sriyana (Jurnal, 2016) dengan judul “*Labor Absorbtion Under Minimum Wage Policy In Indonesia*”. Data yang digunakan adalah data panel dengan periode dari tahun 2006-2013. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi kecil. Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan, namun penawaran tenaga kerja juga mengalami peningkatan sehingga pengangguran masih ada. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) memiliki efek negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada penelitian ini terjadi *misguided* pada pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak

menurunkan tenaga kerja. Hasil penelitian dalam jurnal ini juga menemukan bahwa di Indonesia terjadi pembangunan spasial, yang mana mengakibatkan adanya perbedaan antara pembangunan yang ada di Jawa dan luar Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailan Safina (Jurnal, 2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara”. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data time series dari tahun 1994-2008. Metode analisis yang digunakan adalah metode linear berganda dengan teknik analisis menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai pengaruh negatif terhadap penciptaan kesempatan kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Turminijati Budi Utami (Tesis, 2009) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (time series) mulai dari tahun 1980 sampai tahun 2007. Metode analisis yang digunakan adalah metode linear berganda dengan teknik analisis menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.

Investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian Sulistiawati (Skripsi, 2012) tentang penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dalam penelitian ini secara umum menunjukkan hasil yang positif yakni bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja. Hal tersebut karena dengan adanya investasi maka dibutuhkan tambahan tenaga kerja untuk merealisasikan investasi tersebut. Misalnya investasi pada suatu perkebunan sawit akan langsung menambah jumlah tenaga kerja sebab diperlukan tenaga kerja dalam mengolah tanah, menanam, memelihara, serta tenaga kerja untuk menejemennya.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh Jude dan Silagi (Jurnal, 2016) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Investasi Di Negara-Negara Eropa Timur. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan *dynamic labor demand model* (*fixed effects dan GMM*). Penelitian ini menemukan hubungan yang negatif antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja di negara-negara Eropa Timur. Hal tersebut karena investasi yang ada dilakukan pada sektor-sektor dengan *capital intensive* dan teknologi yang lebih hemat tenaga kerja.

Sementara penelitian di Mongolia yang dikeluarkan oleh Davaakhun *et al.* (Jurnal, 2014) yang berjudul “Foreign Direct Investment In A Transition Economy: Lesson From The Experience Of Mongolia” menganalisis trend dan pola serta literature review mengenai PMA dan PMDN dalam transisi ekonomi dengan teknik estimasi regresi data panel *Fixed effect* model dengan opsi *cluster*. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah adanya pertumbuhan PMDN dan pertumbuhan PMA di Mongolia serta adanya reformasi kebijakan yang

memfasilitasi masuknya investasi di Mongolia gagal menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan oleh investasi tersebut hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, karena investasi tersebut dialokasikan untuk sektor yang padat modal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Makna (2016) yang berjudul “Pengaruh rata-rata lama sekolah berpendidikan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012”. Metode analisis yang dipakai adalah regresi berganda. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja berpengaruh. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam penelitian Shinozaki (Jurnal, 2012) di Jepang yang berjudul “Not by Education Alone: How Young Adult’s Employment Status Is Determined by Employment Environment and family Background” (versi elektronik). Metode analisis yang dipakai adalah *multiple probit model*. Penelitian ini menemukan hubungan yang positif antara pendidikan dengan kesempatan seseorang untuk bekerja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada tema yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai penyerapan tenaga kerja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada wilayah yang diteliti yakni dalam penelitian ini 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2017, serta variabel secara spesifik digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya diringkas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis (tahun)	Alat analisis/ metode analisis	Hasil
1	Labor Absorbtion Under Minimum Wage Policy In Indonesia	Nur Feriyanto dan Jaka Sriyana (2016)	OLS / <i>fixed effect</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 2. Upah Minimum memberikan efek negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. 3. Adanya disparitas dalam penyerapan tenaga kerja dimana

				<p>pulau Jawa memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain di Indonesia.</p> <p>4. Investasi domestik dan asing memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.</p>
2	<p>Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara</p>	<p>Lailan Safina (2011)</p>	<p>OLS/ Linier Berganda</p>	<p>1. investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara.</p> <p>2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai</p>

				pengaruh negatif terhadap penciptaan kesempatan kerja.
3	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember	Turminijati Budi Utami (2009)	Linier berganda / OLS	<ol style="list-style-type: none"> 1. upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. 2. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.
4	Pengaruh rata-rata lama sekolah berpendidikan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran	Makna (2016)	Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

	pemerintah dektor kesehatan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012			<p>2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja</p> <p>3. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.</p>
5	Foreign Direct Investment In A Transition Economi: Lesson From The Experience Of Mongolia	Davaakhun <i>at al.</i> (2014)	Estimasi regresi data panel <i>Fix effect</i> model dengan opsi cluster	1. adanya pertumbuhan PMDN dan pertumbuhan PMA di Mongolia serta adanya reformasi kebijakan yang memfasilitasi masuknya investasi di Mongolia gagal menciptakan

				lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan.
6	Not by Education Alone: How Young Adult's Employment Status Is Determined by Employment Environment and family Background	Shinozaki (2012)	<i>multiple probit model</i>	1. Pendidikan dengan kesempatan seseorang untuk bekerja berhubungan positif
7	Pengaruh Investasi Di Negara-Negara Eropa Timur	Jude dan Silagi (2016)	<i>dynamic labor demand model (fice effects dan GMM)</i>	1. Adanya hubungan yang negatif antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja di negara-negara Eropa Timur

2.13. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan telah diuraikan di atas mengenai keterkaitan antara variabel bebas penelitian (PMA, PMDN, Rata-rata Lama sekolah, dan UMP) antar wilayah di Indonesia terhadap variabel tetap (penyerapan tenaga kerja). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

2.13.1. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja

2.13.2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja

2.13.3. Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja

2.13.4. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Pengertian data sekunder artinya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data jumlah penyerapan tenaga kerja 33 provinsi di Indonesia, data mengenai investasi yakni data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), data upah minimum 33 Provinsi di Indonesia dan data rata-rata lama sekolah, serta data lainnya yang relevan.

Penelitian ini merupakan penelitian explanatory reasesch, dimana berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan kedudukan variabelnya) penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini penetiti melakukan serangkaian pengujian hipotesis untuk menganalisis pengaruh variabel PMA, PMDN, upah minimum provinsi dan

rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada periode 2008-2017. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikumpulkan, data tersebut mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yang merupakan gabungan data *time-series* (runtutan waktu tertentu) dan data *cross section* (antar daerah)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumenter. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari beberapa sumber yang bersifat tertulis, studi dokumenter dilakukan dengan pengambilan data sekunder dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3.3. Definisi Operasional

3.3.1. Variabel dependen

3.3.1.1. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Penyerapan tenaga kerja yaitu banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Satuan yang digunakan adalah orang. Data penyerapan tenaga kerja diperoleh dari Katalog BPS bagian ketenagakerjaan. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2008-2017.

3.3.2. Variabel Independen

3.3.2.1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing. Data penanaman modal asing dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS Indonesia. Satuan PMA adalah juta US dollar. Periode yang dipakai dalam penelitian ini adalah mulai 2008-2017.

3.3.2.2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri yaitu jumlah realisasi penanaman modal dari negeri sendiri yang diinvestasikan di dalam negeri. Satuan yang digunakan adalah milyar rupiah. Data mengenai PMDN ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) Indonesia. Periode dalam penelitian ini adalah dari 2008-2017.

3.3.2.3. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah minimum provinsi merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi. Satuan yang digunakan rupiah. Data upah minimum provinsi diperoleh dari publikasi online BPS Indonesia. Periode data dalam penelitian ini adalah dari 2008-2017.

3.3.2.4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Satuan yang digunakan adalah tahun. Data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diperoleh dari publikasi online BPS Indonesia. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2008-2017.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, yang merupakan gabungan data *time-series* (runtutan waktu tertentu) dan data *cross section* (antar daerah) dalam kurun waktu 10 tahun dari 2008-2017. Analisis dilakukan menggunakan *software* *eviews 10*.

Keuntungan penggunaan data panel menurut Baltagi (2013):

1. Mampu mengontrol heterogenitas individual, sehingga meminimalkan bias
2. Lebih banyak informasi, variabilitas, derajat kebebasan dan efisiensi dan mengurangi kolinearitas antar variabel
3. Lebih mampu mengamati dinamika penyesuaian disbanding data cross section
4. Data panel mampu mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak terdeteksi pada data *time series* dan *cross section*
5. Memungkinkan untuk membangun dan menguji model perilaku yang lebih kompleks disbanding *time series* dan *cross section*
6. Data panel yang didapatkan dari level mikro akan lebih akurat diukur daripada data panel pada level makro karena bias akibat agregasi individu atau perusahaan dapat direduksi dan di eliminasi
7. Data panel makro yang memiliki rangkaian waktu yang lebih panjang, keika diuji dengan akar unit (*unit root test*) dalam analisa *time series* menunjukkan masalah distribusi *non standard* yang berbeda

Keterbatasan data panel:

1. masalah koleksi data dan desain
2. terjadinya distorsi kesalahan pengukuran
3. masalah selektifitas
4. dimensi time series yang pendek
5. ketergantungan cross section

Adapun persamaan umum estimasi data panel adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + e_{it}, i= 1, 2, \dots, N ; t= 1, 2, \dots, T$$

keterangan: N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

N & T : banyaknya data panel

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (PMA, PMDN, Rata-rata lama sekolah dan Upah minimum Provinsi) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja). Antar provinsi di Indonesia, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda panel data. Perumusan model penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya.

Berikut model persamaan estimasi dalam penelitian ini:

$$\text{Log TK}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log \text{PMA} + \beta_2 \log \text{PMDN} + \beta_3 \log \text{RLS} + \beta_4 \log \text{UMP} + e_{it}$$

keterangan :

Log = Logaritma

β_0 = Intersept konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien masing-masing variabel

TK = Penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2008-2017
(orang)

PMA = Investasi Luar Negeri di Indonesia tahun 2008-2017
(juta USD)

PMDN = Investasi Dalam Negeri di Indonesia tahun 2008-2017
(milyar rupiah)

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan provinsi di
Indonesia tahun 2008-2017 (tahun)

UMP = Upah Minimum Provinsi (rupiah)

e = eror

i = Provinsi

t = Periode tahun 2008-2017

Model persamaan regresi dengan menggunakan model logaritma (Log) memiliki keuntungan yaitu meminimalkan kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas karena transformasi yang menempatkan skala untuk

pengukuran variabel dan koefisien kemiringan β menunjukkan elastisitas Y sehubungan dengan X yaitu persentase perubahan Y untuk persentase perubahan (kecil) tertentu dalam X (Gujarati, 2006)

Guna mencapai tujuan penelitian tahapan-tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskriptifkan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2012).

2. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

- a. Metode Estimasi Data Panel

- 1) Metode Pooled Least Square

Pendekatan paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data berbentuk pool. Metode ini mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu (*intercept* dan *slope* dianggap sama/konstan).

- 2) Fixed Effect

Metode pendekatan efek tetap (*fixed effect model*) merupakan model yang mengasumsikan

koefisien *slope* konstan tetapi *intercept* bervariasi antar individu.

3) Random Effect

Dalam model efek acak (*random effect model*), parameter- parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. Setiap individu memiliki keragaman konstanta dan berlaku bagi pengamatan di dalam individu tersebut.

b. Pemilihan metode

1) Uji Chow

Pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan common effect atau fixed effect dapat dilakukan dengan Uji Chow.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ho : Common Effect

Ha : Fixed Effect

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (Ho) adalah apabila nilai probabilitas $F < \alpha$ (0,05).

2) Uji Hausman

Pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan random effect atau fixed effect dapat dilakukan dengan uji hausman. Hipotesis yang digunakan dalam hausman test adalah :

Ho: Random Effect

Ha: Fixed effect

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (Ho) adalah apabila nilai probabilitas $F < \alpha$ (0,05).

3) Uji Langrange Multiple (LM)

Pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan metode random effect atau common effect. Uji Langrange Multiple (LM) didasarkan pada distribusi Chi-

Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Pengambilan keputusannya adalah jika nilai LM hitung > nilai kritis Chi-Squares maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan hipotesis :

H_0 : Common Effect

H_a : Random Effect

Jika LM statistik lebih besar dari chi-square table maka H_0 ditolak sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *random effect*.

3. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi dalam penelitian ini menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier.

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

$$\text{Linier: } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$\text{Log Linier : } \text{Log}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + \beta_4 \text{Log}X_4 + e$$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa:

Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

- a. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F1.
- b. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F2.
- c. Dapatkan nilai $Z1 = \log F1-F2$ dan $Z2 = \text{antilog } F2-F1$
- d. Estimasi persamaan berikut ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z_1 + e$$

Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier

- e. Estimasi persamaan berikut :

$$\text{Log}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + \beta_4 \text{Log}X_4 + \beta_5 Z_2 + e$$

Jika Z2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak

signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier. (Widarjono, 2005).

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Pengujian normalitas dilakukan dengan maksud untuk melihat normal tidaknya data yang dianalisis. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Nilai residual yang berdistribusi normal dapat diketahui dari bentuk kurva yang membentuk gambar lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga. Selain menggunakan grafik, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan metode Jarque-Bera (uji JB). Uji JB dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Jarque-Bera.

Menurut Widarjono (2015) model regresi yang berdistribusi normal memiliki nilai probabilitas $JB > 0,05$ ($\alpha = 0,05$). Sebaliknya jika nilai probabilitas $JB < 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat korelasi antar masing-masing variabel bebas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai korelasi antar dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka variabel bebas tersebut tidak memiliki persoalan multikolinieritas, begitu juga sebaliknya.

c. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah situasi penyebaran data yang tidak sama atau tidak samanya variansi sehingga uji signifikansi tidak valid. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual (kesalahan pengganggu) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas (sama variannya).

Salah satu cara mendeteksi masalah heterokedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai absolut residual (Widarjono, 2015).

Jika nilai probabilitas variabel bebas $< 0,05$ (taraf signifikan atau $\alpha = 0,05$) maka terjadi heteroskedastis, sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka terjadi homokedastis.

d. Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut deret waktu. Menurut Gujarati (2006), pengujian paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji statistik Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai dL dan Du , dengan K = jumlah variabel bebas dan n = ukuran sampel. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Individual)

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansinya. Apabila nilai Prob. $< \alpha$ maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut: Jika nilai probability t-statistik $< 0,05$ maka H_0 ditolak Jika nilai probability t-statistik $> 0,05$ maka H_a ditolak.

b. Uji F (Koefisien Regresi Secara Keseluruhan)

Uji F (Uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat Prob (F-

statistic). Apabila nilai Prob (F-statistic) $< 0,05$ ($\alpha = 0,05$) maka koefisien regresi secara keseluruhan signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variabel terikat yang dihitung. Nilai R^2 yang kecil/mendekati nol, berarti kemampuan variabelvariabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas atau kecil. Nilai R^2 yang besar mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Statistik

Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder. Data penyerapan tenaga kerja, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan BPS masing-masing provinsi. Data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi data selama 10 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai 2017 sedangkan data *cross section* dalam penelitian ini meliputi dari 33 Provinsi di Indonesia. Variabel terikat pada penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel bebas pada penelitian ini adalah realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah. Berikut deskripsi data variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1 Tabel Deskripsi Statistik

	TK	PMA	PMDN	RLS	UMP
Mean	3451786.	724.8179	3711.723	7.843909	1305404.
Median	1917139.	173.6500	1031.650	7.816000	1176000.
Maximum	20722338	9927.600	47262.30	11.02000	3355750.
Minimum	312205.0	0.200000	0.100000	5.220000	500000.0
Std. Dev.	4894828.	1331.012	7144.423	0.991582	526891.8
Skewness	2.535108	3.242021	3.681690	0.235077	0.835334
Kurtosis	8.175749	15.57225	18.74422	3.587234	3.187341
Jarque-Bera	721.8126	2751.434	4153.871	7.780979	38.86063
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.020435	0.000000
Sum	1.14E+09	239189.9	1224869.	2588.490	4.31E+08
Sum Sq. Dev.	7.88E+15	5.83E+08	1.68E+10	323.4844	9.13E+13
Observations	330	330	330	330	330

Sumber: data BPS diolah dengan *evIEWS 10*

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat dilihat deskripsi statistik data dalam penelitian ini. Dapat dilihat terdapat nilai maximum yang menunjukkan nilai tertinggi dari setiap variabel, nilai minimum yang menunjukkan nilai terendah dari setiap variabel, nilai mean yang menunjukkan nilai rata-rata dari setiap variabel, nilai median menunjukkan nilai tengah dari setiap variabel, serta standar deviasi yang menunjukkan seberapa besar perbedaan nilai sampel terhadap rata-ratanya.

Berdasarkan tabel 4.1 penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam kurun waktu 2008-2017 sebanyak 20.722.338 orang yaitu penyerapan

tenaga kerja di Jawa Barat pada tahun 2017, sedangkan penyerapan tenaga kerja terendah sebanyak 312.205 orang yaitu penyerapan tenaga kerja di Daerah Papua Barat pada tahun 2010. Sementara rata—rata penyerapan tenaga kerja di 33 provinsi di Indonesia adalah sebesar 3.458.310 orang.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi dalam kurun aktu 2008-2017 adalah sebesar 9.927,600 juta USD yaitu PMA di Provinsi DKI Jakarta pada 2008, sementara terendah adalah 0.2 juta USD yakni PMA di Sumatera Barat pada tahun 2009. Rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia pada periode 2008-2017 adalah sebesar 724,893 juta USD. Sementara realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam kurun waktu 2008-2017, tertinggi adalah sebesar Rp.47262.3 milyar yakni realisasi PMDN di DKI Jakarta 2017 dan terendah sebesar. Sementara Rp.0.1 milyar yakni PMDN di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010. Rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 33 provinsi di Indonesia adalah sebesar Rp.3711.723 milyar rupiah.

Upah minimum provinsi tertinggi dalam kurun waktu 2008- 2017 sebesar Rp3.355.750 yaitu upah minimum provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, sedangkan upah minimum provinsi terendah sebesar Rp 500.000 yaitu upah minimum provinsi Jawa Timur pada tahun 2010.

Rata-rata lama sekolah tertinggi di 33 Provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2008-2017 yang tertinggi adalah selama 11,02 tahun atau setingkat kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni rata-rata lama

sekolah di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Sementara rata-rata lama sekolah terendah di 33 Provinsi di Indonesia adalah 5,22 tahun atau setara dengan Sekolah Dasar (SD) yang mana merupakan rata-rata lama sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara rata-rata lama sekolah antar provinsi di Indonesia adalah 7,844 tahun atau setara dengan bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

4.2. Penentuan Model Estimasi Data Panel

Perumusan model penelitian ini merujuk pada tinjauan teori.

Berikut model persamaan estimasi dalam penelitian ini:

$$\text{Log TK}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log PMA} + \beta_2 \text{Log PMDN} + \beta_3 \text{Log RLS} + \beta_4 \text{Log UMP} + e_{it}$$

keterangan :

Log = Logaritma

β_0 = Intersept konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien masing-masing variabel

TK = Penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2008-2017 (orang)

PMA = Investasi Luar Negeri di Indonesia tahun 2008-2017 (juta USD)

PMDN = Investasi Dalam Negeri di Indonesia tahun 2008-2017 (milyar rupiah)

RLS = Rata-rata lama sekolah berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2008-2017 (tahun)

UMP = Upah minimum Provinsi (rupiah)

e = eror

i = Provinsi

t = Periode tahun 2008-2017

Sebelum melakukan estimasi data panel diperlukan pemilihan model terbaik yang akan digunakan untuk mengestimasi data panel tersebut. Pemilihan model tersebut melalui beberapa pengujian. Pengujian

yang dimaksud adalah uji *Chow* yang digunakan untuk memilih *Pooled Least Square* atau *fixed effect*. Uji Hausman digunakan untuk memilih *fixed effect* atau random effect sedangkan uji LM test digunakan untuk memilih antara *Pooled Least Square* atau *random effect*. Berikut hasil pemilihan estimator yang telah dilakukan:

4.2.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih metode estimasi terbaik antara metode *common effect* atau *fixed effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji Chow dengan probabilitas 0,05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji Chow sebagai berikut:

Ho : Common Effect

Ha : Fixed Effect

Dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai probabilitas untuk *cross-section F* pada uji regresi dengan pendekatan *fixed effect* lebih dari 0,05 (tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$) maka Ho diterima sehingga model yang terpilih adalah *pooled least square*, tetapi jika nilainya kurang dari 0,05 maka Ho ditolak sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 4.2 Tabel Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1477.500134	(32,293)	0.0000
Cross-section Chi-square	1679.649884	32	0.0000

Sumber: output eviews

Berdasarkan hasil uji Chow di atas nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0000 lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05 ($0,0000 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan otomatis menerima H_a . Artinya dalam penelitian ini model estimasi *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *pooled least square*. Setelah mengetahui bahwa metode *fixed effect* lebih baik daripada metode *common effect* selanjutnya perlu dilakukan uji Hausman.

4.2.2. Uji Hausman

Metode pemilihan estimasi selanjutnya yang digunakan adalah uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi yang lebih tepat digunakan antara model *fixed effect* dan *random effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji Hausman dengan probabilitas 0,05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

Ho : Random Effect

Ha : Fixed Effect

Dengan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai untuk Prob $> \chi^2$ lebih besar dari 0,05 (tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$) maka Ho diterima sehingga model yang terpilih adalah *random effect*, tetapi jika nilainya kurang dari 0,05 maka Ho ditolak sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Gambar 4.3 Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Hasil

Uji	Chi-Sq.			
Hausman	Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
	Cross-section random	72.519711	4	0.0000

Sumber: output views

Berdasarkan hasil uji Hausman pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Prob $> \chi^2$ sebesar 0,0000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Artinya dalam penelitian ini model estimasi yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect* daripada *random effect*. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman maka metode yang paling tepat digunakan dalam model penelitian ini adalah metode *fixed effect*.

4.3. Uji Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi dalam penelitian ini menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier. Dalam penelitian ini uji MWD yang dilakukan menggunakan estimasi:

Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X (model log linier)

G

a Dependent Variable: TK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/29/18 Time: 18:40
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 b Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 330

	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
r	C	-15082645	2440735.	-6.179550	0.0000
	PMA	463.2291	132.7243	3.490160	0.0005
	PMDN	318.5787	25.03394	12.72587	0.0000
	RLS	-637974.8	159448.0	-4.001146	0.0001
4	UMP	-2.005963	0.292420	-6.859870	0.0000
	Z1	3009928.	244441.1	12.31351	0.0000
.	R-squared	0.742697	Mean dependent var		3451786.
	Adjusted R-squared	0.738726	S.D. dependent var		4894828.
4	S.E. of regression	2501989.	Akaike info criterion		32.32108
	Sum squared resid	2.03E+15	Schwarz criterion		32.39016
	Log likelihood	-5326.979	Hannan-Quinn criter.		32.34864
	F-statistic	187.0431	Durbin-Watson stat		0.182778
	Prob(F-statistic)	0.000000			

H

asil Uji MWD Pada Z1

sumber:output eviews

Gambar 4.5 Hasil Uji MWD Pada Z2

Dependent Variable: LOG_TK
Method: Panel Least Squares
Date: 12/29/18 Time: 18:41
Sample: 2008 2017
Periods included: 10
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.963282	0.455398	15.29052	0.0000
LOG_PMA	0.058792	0.016231	3.622219	0.0003
LOG_PMDN	0.092453	0.014782	6.254487	0.0000
LOG_RLS	-0.066393	0.215674	-0.307841	0.7584
LOG_UMP	-0.199851	0.078453	-2.547399	0.0113
Z2	-6.00E-08	2.99E-09	-20.07799	0.0000
R-squared	0.801301	Mean dependent var	6.281187	
Adjusted R-squared	0.798234	S.D. dependent var	0.437162	
S.E. of regression	0.196366	Akaike info criterion	-0.399660	
Sum squared resid	12.49329	Schwarz criterion	-0.330586	
Log likelihood	71.94397	Hannan-Quinn criter.	-0.372108	
F-statistic	261.3209	Durbin-Watson stat	0.138927	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: output eviews

Berdasarkan hasil uji MWD di atas diketahui bahwa Z1 dan Z2 memiliki probabilitas 0,000 yang mana $< \alpha$ (0,05) artinya keduanya signifikan. Untuk memilih model regresi yang digunakan apakah linier atau log linier, maka dalam penelitian ini dilihat nilai R^2 (*R-squared*). Dalam penelitian ini R^2 dari Z1 adalah sebesar 0,742 sedangkan R^2 adalah sebesar 0,801. Sehingga dalam penelitian ini model regresi yang dipilih adalah log linier karena berdasarkan R^2 , Z2 lebih mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini yakni sebesar 80%.

4.4. Uji *Intercept* Antar Provinsi

T

no	Provinsi	Effect
^a 1	Aceh	-0.02172
^b 2	Sumatera Utara	0.454068
3	Sumatera Barat	0.057895
^e 4	Riau	0.082943
5	Jambi	-0.104827
^l 6	Sumatera Selatan	0.271383
7	Bengkulu	-0.316798
8	Lampung	0.314793
⁴ 9	Bangka belitung	-0.487672
10	Kepulauan Riau	-0.462748
11	DKI Jakarta	0.25431
12	Jawa Barat	0.988915
^d 13	Jawa Tengah	0.984285
14	DIY	0.001801
15	Jawa Timur	1.044712
16	Banten	0.351615

H

no	Provinsi	Effect
17	Bali	0.05701
18	NTT	0.113164
19	NTB	0.14598
20	Kalimantan Barat	0.112858
21	Kalimantan Tengah	-0.2182
22	Kalimantan Selatan	-0.01486
23	Kalimantan Timur	-0.16429
24	Sulawesi Utara	-0.31071
25	Sulawesi Tengah	-0.1581
26	Sulawesi Selatan	0.248983
27	Sulawesi Tenggara	-0.25231
28	Gorontalo	-0.5437
29	Sulawesi Barat	-0.48757
30	Maluku	-0.50958
31	Maluku Utara	-0.63144
32	Papua Barat	-0.7311
33	Papua Barat	-0.06909

asil Koefisien Per-Provinsi

Sumber: output eviws

no	Provinsi	Effect	C	Koefisien
1	Aceh	-0.02172	4.989591	4.967871
2	Sumatera Utara	0.454068	4.989591	5.443659
3	Sumatera Barat	0.057895	4.989591	5.047486
4	Riau	0.082943	4.989591	5.072534
5	Jambi	-0.104827	4.989591	4.884764
6	Sumatera Selatan	0.271383	4.989591	5.260974
7	Bengkulu	-0.316798	4.989591	4.672793
8	Lampung	0.314793	4.989591	5.304384
9	Bangka Belitung	-0.487672	4.989591	4.501919
10	Kepulauan Riau	-0.462748	4.989591	4.526843
11	DKI Jakarta	0.25431	4.989591	5.243901
12	Jawa Barat	0.988915	4.989591	5.978506
13	Jawa Tengah	0.984285	4.989591	5.973876
14	DIY	0.001801	4.989591	4.991392
15	Jawa Timur	1.044712	4.989591	6.034303
16	Banten	0.351615	4.989591	5.341206
17	Bali	0.05701	4.989591	5.046601
18	NTT	0.113164	4.989591	5.102755
19	NTB	0.14598	4.989591	5.135571
20	Kalimantan Barat	0.112858	4.989591	5.102449
21	Kalimantan Tengah	-0.2182	4.989591	4.771392
22	Kalimantan Selatan	-0.01486	4.989591	4.974728
23	Kalimantan Timur	-0.16429	4.989591	4.825297
24	Sulawesi Utara	-0.31071	4.989591	4.678878
25	Sulawesi Tengah	-0.1581	4.989591	4.83149
26	Sulawesi Selatan	0.248983	4.989591	5.238574
27	Sulawesi Tenggara	-0.25231	4.989591	4.737285
28	Gorontalo	-0.5437	4.989591	4.445896
29	Sulawesi Barat	-0.48757	4.989591	4.502021
30	Maluku	-0.50958	4.989591	4.480007
31	Maluku Utara	-0.63144	4.989591	4.35815
32	Papua Barat	-0.7311	4.989591	4.258495
33	Papua Barat	-0.06909	4.989591	4.920503

Tabel 4.6 Hasil Koefisien Per-
Provinsi Berdasarkan Estimasi
Fixed Effect

Sumber: output views

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui koefisien antar provinsi di Indonesia, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah di Provinsi Jawa Barat dengan koefisien sebesar 5,978506. Hal ini terjadi karena Provinsi Jawa barat merupakan Provinsi yang memiliki beberapa pusat Industri, seperti pusat industri yang ada di Bekasi, kawasan Industri Karawang, dan juga kawasan industri Cikampek. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat Menjadi Provinsi dengan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sedangkan berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui bahwa Papua Barat memiliki angka

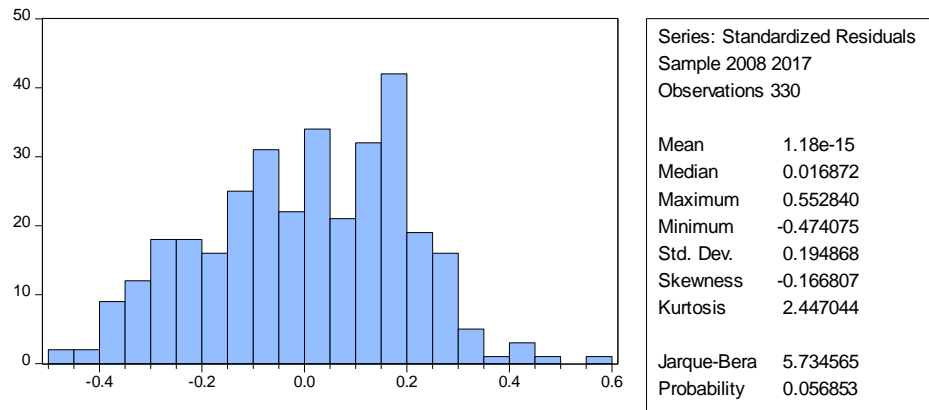
penyerapan tenaga kerja yang rendah yakni sebesar 4.258495, hal ini terjadi karena lapangan kerja yang tersedia di Papua Barat tidak banyak belum adanya pusat industri di kawasan provinsi Papua Barat menjadikan Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan angka penyerapan tenaga kerja terendah. Diharapkan kedepannya pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menggali potensi daerah yang ada agar dapat memperluas lapangan kerja yang ada di Provinsi Papua Barat.

4.5. Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Pengujian normalitas dilakukan dengan maksud untuk melihat normal tidaknya data yang dianalisis. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji Jarque-Berra (uji JB). Uji JB merupakan uji normalitas berdasarkan pada koefisien keruncingan (kurtosis) dan koefisien kemiringan (skewness). Dalam uji JB normalitas dapat dilihat dari besaran nilai probability JB, jika nilai probability JB $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probability $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas



sumber: output views

Berdasarkan hasil uji normalitas data penelitian diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera (JB) besar $0.000 < \alpha 0,05$ artinya data penelitian berdistribusi normal.

4.5.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi yang dilakukan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai korelasi antar dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka variabel bebas tersebut tidak memiliki persoalan multikolinieritas, begitu juga sebaliknya.

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolenieritas

	LOG_PMA	LOG_PMDN	LOG_RLS	LOG_UMP

LOG_PMA	1.000000	0.672902	0.230941	0.333825
LOG_PMDN	0.672902	1.000000	0.119825	0.301083
LOG_RLS	0.230941	0.119825	1.000000	0.375864
LOG_UMP	0.333825	0.301083	0.375864	1.000000

Sumber: output eviews

Berdasarkan hasil uji multikolenieritas di atas, diketahui bahwa nilai korelasi tiap variabel adalah kurang dari 0,8 artinya data pada penelitian ini tidak memiliki persoalan multikolinearitas.

4.5.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila terdapat korelasi antar residual, dimana residual pada waktu ke t akan dipengaruhi oleh residual pada waktu sebelumnya ($t-1$). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan membandingkan nilai Durbin Watson hasil regresi dengan tabel Durbin Watson. Untuk nilai $n=33$ dan $k=4$, nilai $dL= 1,1927$ sedangkan $dU= 1,7298$. Apabila nilai $dU < d < 4 - dU$ maka dikatakan tidak mengandung autokorelasi, baik positif maupun negatif.

T

abel
4.9
Hasil
Uji
Autoko
relasi

R-squared	0.997254	Mean dependent var	6.281187
Adjusted R-squared	0.996916	S.D. dependent var	0.437162
S.E. of regression	0.024277	Akaike info criterion	-4.493274
Sum squared resid	0.172683	Schwarz criterion	-4.067315
Log likelihood	778.3902	Hannan-Quinn criter.	-4.323365
F-statistic	2955.308	Durbin-Watson stat	0.864769
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: output eviews

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0,846990. Karena nilai $du(1,7298) > d(1,86990)$ dan $d(1,86990) < 4 - du(2,2702)$ maka model regresi mengandung autokorelasi atau asumsi tidak terjadi autokorelasi tidak terpenuhi.

Namun demikian hal ini tidak menjadi masalah sebab dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel. Sementara uji autokorelasi ditujukan untuk data yang bersifat *time-series*, yang mana terdapat pengaruh antara data dari tahun sebelumnya dengan data pada periode sekarang.

4.5.4. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah suatu penyimpangan OLS dalam bentuk varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS tidak bernilai konstan (Yuwono, 2015). Akibat dari heterokedastisitas pada regresi adalah sebagai berikut:

1. Varians tidak lagi minimum
2. Pengujian dari koefisien regresi menjadi kurang kuat
3. Koefisien menjadi bias
4. Kesimpulan yang diambil menjadi salah

Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi perbedaan varian dari residual variabel independen yang diketahui. Apabila varian dari residual variabel independen yang diketahui membentuk suatu pola tertentu, maka disebut sebagai homokedastisitas. Ada beberapa metode untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heterokedastisitas, yaitu uji Park, uji Glejser, Uji korelasi Spearman, Uji Goldfeld-Quandt, Uji Bruesch-Pagan-Godfrey, dan Uji White (Winarno, 2011).

Gambar 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Panel Period Heteroskedasticity LR Test					
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic					
Equation: HASILZ2					
Specification: LOG_TK C LOG_PMA LOG_PMDN LOG_RLS LOG_UMP Z2					
	Value	df	Probability		
Likelihood ratio	3.794443	33	1.0000		
LR test summary:					
	Value	df			
Restricted LogL	71.94397	324			
Unrestricted LogL	73.84119	324			
Unrestricted Test Equation:					
Dependent Variable: LOG_TK					
Method: Panel EGLS (Period weights)					
Date: 12/29/18 Time: 18:39					
Sample: 2008 2017					
Periods included: 10					
Cross-sections included: 33					
Total panel (balanced) observations: 330					
Iterate weights to convergence					
Convergence achieved after 4 weight iterations					
Variable	Coefficien	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.038616		0.448830	15.68213	0.0000
LOG_PMA	0.059705		0.016073	3.714544	0.0002
LOG_PMDN	0.099321		0.014693	6.759669	0.0000
LOG_RLS	-0.072492		0.214705	-0.337637	0.7359
LOG_UMP	-0.214222		0.077281	-2.771976	0.0059
Z2	-5.87E-08		2.97E-09	-19.79430	0.0000
Weighted Statistics					
R-squared	0.805379		Mean dependent var		6.342916
Adjusted R-squared	0.802375		S.D. dependent var		0.692512
S.E. of regression	0.196471		Akaike info criterion		-0.411159
Sum squared resid	12.50668		Schwarz criterion		-0.342084

Log likelihood	73.84119	Hannan-Quinn criter.	-0.383606
F-statistic	268.1543	Durbin-Watson stat	0.146809
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.801087	Mean dependent var	6.281187
Sum squared resid	12.50670	Durbin-Watson stat	0.155692

Sumber: output views

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas di atas, diketahui bahwa data dalam penelitian ini homokedastisitas atau tidak terdapat heterokedastisitas. Artinya dalam penelitian ini varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (homokedastisitas).

4.5. Estimasi Model Regresi

Estimasi model regresi menggunakan data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja, Hasil estimasi adalah sebagai berikut:

G

amb Dependent Variable: LOG_TK

ar Sample: 2008 2017

Periods

4.11 included: 10

Hasi Cross-sections included: 33

l Total panel (balanced) observations: 330

Regr	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
esi	C	4.989591	0.084741	58.88050	0.0000
	LOG_PMA	0.016152	0.002870	5.628759	0.0000
	LOG_PMDN	-0.000440	0.002750	-0.160119	0.8729
	LOG_RLS	0.641237	0.126448	5.071147	0.0000
	LOG_UMP	0.112966	0.015105	7.478538	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997254	Mean dependent var	6.281187
Adjusted R-squared	0.996916	S.D. dependent var	0.437162
S.E. of regression	0.024277	Akaike info criterion	-4.493274
Sum squared resid	0.172683	Schwarz criterion	-4.067315
Log likelihood	778.3902	Hannan-Quinn criter.	-4.323365
F-statistic	2955.308	Durbin-Watson stat	0.864769
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: output eviews

4.6. Uji Statistik F (F-TEST)

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan investasi Penanaman Modal Asing (PMA), investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rata-rata lama sekolah, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah:

Ho : investasi Penanaman Modal Asing (PMA), investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rata-rata lama sekolah, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara simultan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja

Ha : investasi Penanaman Modal Asing (PMA), investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rata-rata lama sekolah, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja

Berdasarkan hasil estimasi pada gambar 4.11 di atas diketahui bahwa Prob (Fstatistic) sebesar 0,000000. Nilai signifikansi $0,000000 < 0,05$ menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menolak Ho (menerima Ha) yang artinya secara statistik bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

4.7. Uji Statistik T (T-test)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.11 maka dapat dijelaskan uji hipotesis dari masing masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

4.7.1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja

Ha : Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja

$\alpha = 5\% (0,05)$

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki koefisien 0,016152 dan angka probability sebesar 0,0000. Berdasarkan hipotesis gagal menolak Ho artinya PMA berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.7.2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja

Ha : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja

$$\alpha = 5\% (0,05)$$

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki angka koefisien -0,000440 dan probability 0,8729. Artinya PMDN tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.7.3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja

H_a : Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja

$$\alpha = 5\% (0,05)$$

Rata-rata lama sekolah berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.11 memiliki koefisien 0,641237 dan memiliki probability 0,0000. artinya, berdasarkan hipotesis gagal menolak H_0 , sehingga rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.7.4. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Upah minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja

H_a : Upah minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja

$\alpha = 5\%$ (0,05)

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki koefisien sebesar 0,112966 dan probabilitas 0,000. Berdasarkan hipotesis menolak H_0 atau menerima H_a . Artinya UMP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.8. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variasi perubahan variabel terikat penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2008-2017 yang dipengaruhi oleh variabel bebas Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rata-rata lama sekolah, dan Upah minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut: Dari hasil pengujian nilai R^2 sebesar 0,997254.

Artinya adalah bahwa variasi perubahan variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh variabel bebas PMA, PMDN, rata-rata lama sekolah, dan UMP adalah sebesar 99,72%. Sedangkan sisanya sebesar 0,28% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.9. Interpretasi Hasil Estimasi

Berdasarkan gambar 4.11 di atas diperoleh hasil estimasi persamaan model: $\text{Log TK}_{it} = 4,989591 + 0,016152 \text{ Log PMA} - 0,000440 \text{ Log PMDN} + 0,641237 \text{ Log RLS} + 0,112966 \text{ Log UMP} + e_{it}$

Dari hasil persamaan di atas menunjukkan Probabilitas konstanta sebesar 0,0000 kurang dari α (0,05) artinya signifikan. Konstanta sebesar 4,989591 menunjukkan bahwa, ketika variabel independent Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rata-rata lama sekolah, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah konstan, maka penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 4,989%.

Dari hasil persamaan di atas menunjukkan bahwa probabilitas variabel menunjukkan angka 0,0000 kurang dari α (0,05), artinya variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengaruh investasi Penanaman Modal Asing terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 0,016152. Artinya apabila terjadi kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,016%. Dari persamaan di atas dapat pula diketahui bahwa pengaruh antara investasi Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) terhadap penyerapan kerja adalah $-0,000440$. Probabilitas variabel menunjukkan angka $0,8729$ lebih besar dari $\alpha (0,05)$, artinya tidak signifikan atau variabel PMDN tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Probabilitas variabel rata-rata lama sekolah menunjukkan angka $0,0000$ kurang dari $\alpha (0,05)$, artinya variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan. Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar $0,641237$. Artinya ketika terjadi kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar $0,64\%$. Probabilitas variabel Upah Minimum Provinsi menunjukkan angka $0,0000$ kurang dari $\alpha (0,05)$, artinya variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar $0,351358$. Artinya, setiap terjadinya kenaikan UMP sebesar 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar $0,35\%$.

Pembahasan Hasil Estimasi

4.9.1. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil regresi yang menunjukkan Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut karena pada kurun waktu 2008-2017 banyak proyek-proyek besar pemerintah yang didanai oleh asing. Hal ini

dipicu oleh adanya fokus pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah saat ini gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang besar (mega proyek infrastruktur) yang mana didanai oleh investor asing. Pembangunan proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain fasilitas umum ini tentunya memerlukan banyak tenaga kerja untuk merealisasikannya.

Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di 2017, pemerintah telah merencanakan untuk melakukan beberapa hal. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah akan mendorong skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) dengan availability payment, mendorong pengadaan yang lebih transparan untuk mendorong investasi asing (www.merdeka.com)

Beberapa proyek strategis yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini merupakan proyek-proyek yang didanai oleh investor asing yang menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Penanaman Modal Asing (PMA) yang berfokus pada sektor padat karya ini tentu memberikan dampak terhadap menyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dimana ketika terjadi penambahan jumlah sektor padat karya yang didanai oleh PMA di Indonesia, maka

kesempatan kerja akan semakin besar. Dengan adanya penambahan jumlah kesempatan kerja yang ada ini, jumlah tenaga kerja yang terserap juga semakin banyak.

Hal demikianlah yang membuat pada penelitian ini terdapat temuan dimana PMA berhubungan positif dengan jumlah penyerapan tenaga kerja. Artinya jika investasi asing meningkat maka penyerapan tenaga kerja pada tahun 2008-2017 di 33 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan pula.

Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jude dan Silagi (2016) dimana investasi memiliki hubungan yang negatif dengan penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa adanya investasi asing dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Secara teori peningkatan investasi akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya kenaikan investasi maka mendorong volume perdagangan dan volume produksi.

4.9.2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil regresi menunjukkan bahwa adanya PMDN tidak signifikan dan bertanda negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hal ini dikarenakan alokasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang ada dialokasikan tidak pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*) namun pada sektor padat modal (*capital intensive*).

Pemerintah hendaknya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi di daerah untuk menarik lebih banyak investor dalam negeri, baik melalui promosi potensi daerah maupun peningkatan fasilitas pendukung seperti infrastruktur.

Pemberlakuan sistem pelayanan terpadu satu pintu serta adanya pemotongan regulasi perijinan akan mampu mendorong investor dalam negeri untuk berinvestasi di daerah tersebut, tak ketinggalan sektor yang menjadi tujuan investasi yang masuk ke daerah haruslah sektor-sektor yang padat karya.

Hal ini sejalan dengan hasil temuan Davaakhu *et al.* (2014), yang menyimpulkan bahwa adanya investasi di Mongolia gagal untuk mencapai tujuan dari MDG's yaitu penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Penyebab dari PMDN tidak berpengaruh dikarenakan investasi yang ditujukan pada investasi padat modal, dan perusahaan yang terkumpul di daerah perkotaan saja serta investasi yang ada tersebut kurang memadai sehingga dampaknya tidak mengalir ke daerah-daerah.

4.9.3. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengaruh rata-rata lama sekolah di 33 provinsi di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif dan signifikan. Hubungan yang positif antara penyerapan tenaga kerja dengan rata-rata lama sekolah terjadi karena diduga sektor-sektor yang penambahan penyerapannya tinggi membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang lebih baik. Selain itu, apabila seseorang memiliki angka rata-rata lama sekolah yang tinggi maka seseorang tersebut akan memiliki kualifikasi dan produktifitas kerja yang lebih dibandingkan dengan yang memiliki angka rata-rata lama sekolah yang rendah. Dengan demikian pengusaha akan cenderung memilih tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan produktifitas yang tinggi. Sehingga seseorang angka rata-rata lama sekolah yang tinggi akan lebih terserap dalam pasar tenaga kerja.

Dari data BPS (2015) sektor dengan penambahan jumlah tenaga kerja tertinggi berturut-turut adalah sektor industri (516,544 tenaga kerja), sektor jasa (356,913 tenaga kerja) dan sektor perdagangan (253,417 tenaga kerja). Sementara sektor pertanian menjadi lapangan kerja utama di Indonesia justru mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja menjadi sebanyak 690,814 tenaga kerja. Seperti yang telah diketahui bahwa sektor pertanian

merupakan sektor yang membutuhkan kualifikasi pendidikan yang relatif rendah dari sektor lainnya.

Seiring dengan masuknya pengaruh globalisasi dan juga era masyarakat ekonomi ASEAN. Yang mana Indonesia kini telah memasuki era pasar bebas kawasan ASEAN, maka kualifikasi terhadap tenaga kerja juga semakin ketat. Hal ini memicu lapangan kerja untuk meningkatkan standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Salah satu kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan adalah dari segi pendidikan. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang rendah. Sesuai dengan teori yang ada bahwa pendidikan tenaga kerja akan mempengaruhi produktifitas tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan angka rata-rata lama sekolah yang ada akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap di pasar tenaga kerja secara positif dan signifikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Shinozaki (2012) yang secara umum menyebutkan bahwa terjadi hubungan yang positif dan signifikan antara penyerapan tenaga kerja dengan rata-rata lama sekolah. Namun tidak sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Makna (2016) yang menyebutkan bahwa terjadi hubungan yang negatif dan signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan penyerapan tenaga kerja.

4.9.4. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Namun demikian yang terjadi adalah pemerintah umumnya menentukan UMP yang bersifat politis dimana hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja. Sehingga pemerintah dalam hal ini nasional dan juga provinsi cenderung menaikkan tingkat upah minimum dari tahun ke tahun.

Umumnya kenaikan upah minimum tersebut tertuang didalam peraturan daerah masing-masing provinsi. Hal ini membuat para produsen atau pelaku bisnis yang ada di daerah mau tidak mau merekrut jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhannya. Demi meningkatkan produktifitasnya, produsen tetap meningkatkan jumlah tenaga kerja meski Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah selalu naik dari tahun-ke tahun. Meskipun hal ini menyulitkan produsen sebagai penyedia lapangan kerja, namun

pengusaha tidak mempunyai pilihan lain karena relokasi lokasi produksi juga memerlukan biaya yang tinggi.

Hal demikianlah yang membuat temuan di penelitian ini dimana terdapat hubungan yang positif antara upah minimum provinsi (UMP) dengan penyerapan tenaga kerja yang ada di 33 provinsi di Indonesia dalam periode 2008-2017.

Hal ini tidak sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya (Nur Feriyanto dan Jaka Sriyana, 2016; Turminijati Budi Utami, 2009) yang mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil studi empiris terdahulu menunjukkan bahwa UMP bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja dimana jika upah naik maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan akan menurun, dan sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

9.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 9.1.1. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Karena pada periode 2008-2017 banyak proyek-proyek besar (*mega proyek*) di Indonesia yang bersumber pada investasi asing, proyek-proyek ini menciptakan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja.
- 9.1.2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini diduga karena alokasi PMDN yang ada lebih dialokasikan kepada sektor yang bersifat *capital intensive* sehingga kurang menyerap tenaga kerja.
- 9.1.3. Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal demikian karena pemerintah cenderung menaikkan UMP dari tahun ke tahun, sebab penentuan besarnya UMP hanya berdasarkan pertimbangan politis semata sementara guna meningkatkan produktifitas

produsen akan cenderung meningkatkan penyerapan tenaga kerja meskipun upah tinggi.

- 9.1.4. Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut karena ketika angka rata-rata lama sekolah seseorang naik maka seseorang akan memiliki pengetahuan yang lebih, akibatnya produktifitas dan kualifikasi seseorang akan lebih baik sehingga semakin mudah terserap di pasar tenaga kerja.

1.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan saran bagi pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana, memperbaiki infrastruktur yang menunjang perekonomian serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.
2. Dalam hal Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pemerintah daerah sebaiknya mengarahkan investasi tidak hanya pada industri padat modal tetapi pada industri yang padat karya, mengingat banyaknya tenaga kerja yang seharusnya bisa diserap.
3. Diharapkan pemerintah daerah berhati-hati dalam menentukan kebijakan tentang besaran Upah Minimum Provinsi, sehingga

mempertimbangkan aspek seperti inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi, bukan berdasarkan pertimbangan politis saja.

4. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di sektor pendidikan dan meningkatkan sarana serta pra-sarana pendidikan agar tercipta tenaga kerja yang terdidik dan cepat terserap di dalam pasar tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Atmanti, H. D. 2005. “Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan.”

Jurnal Dinamika Pembangunan 2(1): 30–39.

Borghans, L. Green, F. dan Mayhew, K. “Skills Measurement and Economic

Analysis: An Introduction.” *Oxford Economic Papers* 53: 375–84.

BPS Indonesia. 2008. Statistik Indonesia 2008. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2009. Statistik Indonesia 2009. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2010. Statistik Indonesia 2010. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2011. Statistik Indonesia 2011. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2012. Statistik Indonesia 2012. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2013. Statistik Indonesia 2013. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2014. Statistik Indonesia 2014. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2015. Statistik Indonesia 2015. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2016. Statistik Indonesia 2016. Jakarta: BPS Indonesia

BPS Indonesia. 2017. Statistik Indonesia 2017. Jakarta: BPS Indonesia

Budi Utami, Turminijanti. 2009. “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk

Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja Dan Investasi Terhadap

Kesempatan Kerja Di Kabupaten Jember.” Universitas Jember.

- Burhani, Ruslan. 2018. "Menaker Optimistis Lampauitarget Lapangan Kerja." *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/724502/menaker-optimistis-lampauitarget-lapangan-kerja>.
- Davaakhuu, Oyunbadam dan Kishor Sharma. 2014. "Foreign Direct Investment in a Transition Economy: Lessons from the Experience of Mongolia." *Sage Journal* 15(4).
- Dumairy. 1996. "Perekonomian Indonesia." In Jakarta: Erlangga.
- Feriyanto, Nur. 2014. "Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia." In Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Feriyanto, Nur dan Jaka Sriyana. 2016. "Labor Absorption Under Minimum Wage Policy In Indonesia." *Regional Science Inquiry* VIII: 11–21.
- Gujarati, Damodar & Dawn C. Porter. 2012. "Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2: Edisi Kelima." In Jakarta: Salamba Empat.
- Gumelar, Galih. 2017. "APEC 2017, Donald Trump Puji Trik Indonesia Hapus Kemiskinan." *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171111163805-78-254992/apec-2017-donald-trump-puji-trik-indonesia-hapus-kemiskinan>.
- Hill, R. C., Griffiths, W. E., Lim, G. C. 2011. "Principles of Econometrics." In New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Jude, C. dan Silaghi, M. I. P. 2016. "Employment Effects of Foreign Direct Investment: New Evidence From Central and Eastern European Countries."

International Economics 145.

Kuncoro, Mudrajat. 2012. “Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi.” In Yogyakarta: UPPM STIM YKPN Yogyakarta.

Kusendi. 2003. “Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Alam.” In Jakarta: Universitas Terbuka.

Leigh, N.G. dan Blakely, J.E. 2016. “Employment Effects of Foreign Direct Investment: New Evidence From Central and Eastern European Countries.” *International Economics*: 145.

M, Haroon M dan Nasr. 2011. “International Review of Business Research Papers.” *Role of Private Investment in Economic Development of Pakistan 7* no.1: 420–39.

Mankiw, N. Gregory. 2003. “Teori Makro Ekonomi.” In Jakarta: Erlangga.

Safina, Lailan. 2011. “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara.” *Jurnal Manajemen & Bisnis* 11: 1–11.

Shinozaki, T. 2012. “Not by Education Alone: How Young Adults’ Employment Status Is Determined by Employment Environments and Family Backgrounds.” *Social Science Japan Journal* 15.

Simajuntak, Payaman J. 1985. “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.” In Jakarta: LPFE UI.

———. 2001. “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.” In Jakarta: LPFE UI.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2001. "Pengantar Teori Makro Ekonomi." In Jakarta: T Raja Grafindo Persaja.
- Sumarsono, Sonny. 2009. "Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia." In Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, M.P. dan Stephen C.S. 2006. "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga: Edisi Kedelapan." In Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Widarjono, Agus. 2005. "Ekonometri Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis." In Yogyakarta: Ekonesia FE UII.

1. Lampiran Deskripsi Statistik

	TK	PMA	PMDN	RLS	UMP
Mean	3451786.	724.8179	3711.723	7.843909	1299205.
Median	1917139.	173.6500	1031.650	7.816000	1172500.
Maximum	20722338	9927.600	47262.30	11.02000	3355750.
Minimum	312205.0	0.200000	0.100000	5.220000	227307.0
Std. Dev.	4894828.	1331.012	7144.423	0.991582	527506.5
Skewness	2.535108	3.242021	3.681690	0.235077	0.822950
Kurtosis	8.175749	15.57225	18.74422	3.587234	3.229091
Jarque-Bera	721.8126	2751.434	4153.871	7.780979	37.97024
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.020435	0.000000
Sum	1.14E+09	239189.9	1224869.	2588.490	4.29E+08
Sum Sq. Dev.	7.88E+15	5.83E+08	1.68E+10	323.4844	9.15E+13
Observations	330	330	330	330	330

2. Lampiran Hasil Uji Mwd Z1

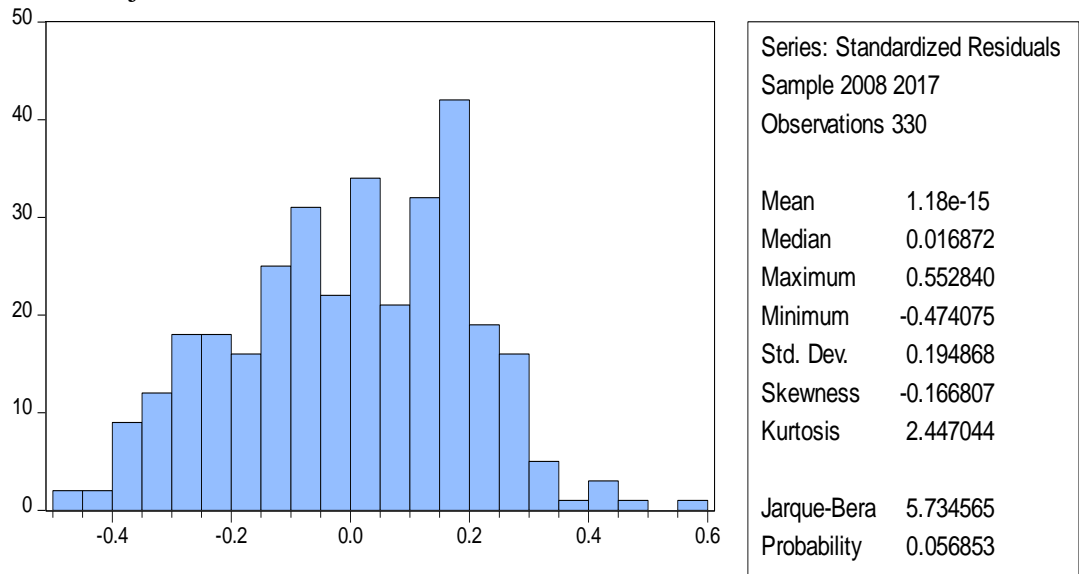
Dependent Variable: TK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/29/18 Time: 18:40				
Sample: 2008 2017				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 330				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15082645	2440735.	-6.179550	0.0000
PMA	463.2291	132.7243	3.490160	0.0005
PMDN	318.5787	25.03394	12.72587	0.0000
RLS	-637974.8	159448.0	-4.001146	0.0001
UMP	-2.005963	0.292420	-6.859870	0.0000
Z1	3009928.	244441.1	12.31351	0.0000
R-squared	0.742697	Mean dependent var	3451786.	
Adjusted R-squared	0.738726	S.D. dependent var	4894828.	
S.E. of regression	2501989.	Akaike info criterion	32.32108	
Sum squared resid	2.03E+15	Schwarz criterion	32.39016	
Log likelihood	-5326.979	Hannan-Quinn criter.	32.34864	
F-statistic	187.0431	Durbin-Watson stat	0.182778	
Prob(F-statistic)	0.000000			

3. Lampiran Hasil Uji Mwd Z2

Dependent Variable: LOG_TK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/29/18 Time: 18:41				
Sample: 2008 2017				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 330				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.963282	0.455398	15.29052	0.0000
LOG_PMA	0.058792	0.016231	3.622219	0.0003
LOG_PMDN	0.092453	0.014782	6.254487	0.0000
LOG_RLS	-0.066393	0.215674	-0.307841	0.7584
LOG_UMP	-0.199851	0.078453	-2.547399	0.0113
Z2	-6.00E-08	2.99E-09	-20.07799	0.0000
R-squared	0.801301	Mean dependent var	6.281187	
Adjusted R-squared	0.798234	S.D. dependent var	0.437162	
S.E. of regression	0.196366	Akaike info criterion	-0.399660	
Sum squared resid	12.49329	Schwarz criterion	-0.330586	
Log likelihood	71.94397	Hannan-Quinn criter.	-0.372108	
F-statistic	261.3209	Durbin-Watson stat	0.138927	
Prob(F-statistic)	0.000000			

4. Lampiran Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



a. Uji Multikolinieritas

	LOG_PMA	LOG_PMDN	LOG_RLS	LOG_UMP
LOG_PMA	1.000000	0.672902	0.230941	0.333825
LOG_PMDN	0.672902	1.000000	0.119825	0.301083
LOG_RLS	0.230941	0.119825	1.000000	0.375864
LOG_UMP	0.333825	0.301083	0.375864	1.000000

b. Uji Heteroskedastisitas

Panel Period Heteroskedasticity LR Test				
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic				
Equation: HASILZ2				
Specification: LOG_TK C LOG_PMA LOG_PMDN LOG_RLS LOG_UMP Z2				
	Value	df	Probability	
Likelihood ratio	3.794443	33	1.0000	
LR test summary:				
	Value	df		
Restricted LogL	71.94397	324		
Unrestricted LogL	73.84119	324		
Unrestricted Test Equation:				
Dependent Variable: LOG_TK				
Method: Panel EGLS (Period weights)				
Date: 12/29/18 Time: 18:39				
Sample: 2008 2017				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 330				
Iterate weights to convergence				
Convergence achieved after 4 weight iterations				
	Coefficien			
Variable	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.038616	0.448830	15.68213	0.0000
LOG_PMA	0.059705	0.016073	3.714544	0.0002
LOG_PMDN	0.099321	0.014693	6.759669	0.0000
LOG_RLS	-0.072492	0.214705	-0.337637	0.7359
LOG_UMP	-0.214222	0.077281	-2.771976	0.0059
Z2	-5.87E-08	2.97E-09	-19.79430	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.805379	Mean dependent var	6.342916	
Adjusted R-squared	0.802375	S.D. dependent var	0.692512	
S.E. of regression	0.196471	Akaike info criterion	-0.411159	
Sum squared resid	12.50668	Schwarz criterion	-0.342084	

Log likelihood	73.84119	Hannan-Quinn criter.	-0.383606
F-statistic	268.1543	Durbin-Watson stat	0.146809
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.801087	Mean dependent var	6.281187
Sum squared resid	12.50670	Durbin-Watson stat	0.155692

5. Lampiran Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1477.500134	(32,293)	0.0000
Cross-section Chi-square	1679.649884	32	0.0000

6. Lampiran Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Chi-Sq.			
Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	72.519711	4	0.0000

7. Lampiran Hasil Regresi

Dependent Variable: LOG_TK

Sample: 2008 2017

Periods

included: 10

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.989591	0.084741	58.88050	0.0000
LOG_PMA	0.016152	0.002870	5.628759	0.0000
LOG_PMDN	-0.000440	0.002750	-0.160119	0.8729
LOG_RLS	0.641237	0.126448	5.071147	0.0000
LOG_UMP	0.112966	0.015105	7.478538	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997254	Mean dependent var	6.281187
Adjusted R-squared	0.996916	S.D. dependent var	0.437162
S.E. of regression	0.024277	Akaike info criterion	-4.493274
Sum squared resid	0.172683	Schwarz criterion	-4.067315
Log likelihood	778.3902	Hannan-Quinn criter.	-4.323365
F-statistic	2955.308	Durbin-Watson stat	0.864769
Prob(F-statistic)	0.000000		

8. Lampiran Data

SATUAN			ORANG	JUTA USD	MILIYAR rupia	TAHUN	RUPIAH
NO	TAHUN	PROVINSI	TK	PMA	PMDN	RLS	UMP
1	2008	ACEH	1,617,622	17.40	54.8	7.768	1000000
	2009		1,691,584	0.40	79.7	7.89	1200000
	2010		1,766,670	4.60	40.9	8.165	1300000
	2011		1,886,530	22.50	259.4	8.24	1350000
	2012		1,922,014	172.30	60.2	8.365	1400000
	2013		1,956,525	94.20	3 636.4	8.45	1550000
	2014		2,026,734	31.10	5 110.3	8.725	1750000
	2015		2,086,762	21.20	4 192.4	8.78	1900000
	2016		2,053,153	134.50	2 456.1	8.865	2118500
2017	2,158,099	23.20	782.8	8.99	2500000		
2	2008	Sumatra Utara	5,364,414	127.20	382.7	8.31	822205
	2009		5,800,771	139.70	2 060.7	8.36	905000
	2010		5,890,066	181.10	662.7	8.52	965000
	2011		6,015,423	753.70	1 673.0	8.57	1035500
	2012		6,015,423	645.30	2 550.3	8.73	1200000
	2013		6,221,646	887.50	5 068.9	8.795	1375000
	2014		6,363,923	550.80	4 223.9	8.94	1505850
	2015		6,171,374	1 246.10	4 287.4	9.04	1625000
	2016		6,165,549	1 014.70	4 864.2	9.13	1811875
2017	6,286,296	1 514.90	11 683.6	9.255	1961354		
3	2008	Sumatra Bara	1,919,044	28.10	340.2	7.65	800000
	2009		2,008,713	0.20	459.0	7.92	880000
	2010		2,101,027	7.90	73.8	8.14	940000
	2011		2,146,576	22.90	1 026.2	8.21	1055000
	2012		2,250,370	75.00	885.3	8.28	1150000
	2013		2,298,377	91.40	677.8	8.31	1350000
	2014		2,344,466	112.10	421.1	8.34	1490000
	2015		2,332,151	57.10	1 552.5	8.475	1615000
	2016		2,427,354	79.30	3 795.6	8.605	1800725
2017	2,465,974	194.40	1 517.0	8.73	1949284		
4	2008	Riau	2,025,384	460.90	1 966.8	7.66	800000
	2009		2,097,955	251.60	3 386.0	7.82	901600
	2010		2,178,403	86.60	1 037.1	8.09	1016000
	2011		2,405,729	212.30	7 462.6	8.15	1120000
	2012		2,481,457	1 152.90	5 450.4	8.205	1238000
	2013		2,693,642	1 304.90	4 874.3	8.365	1400000
	2014		2,661,327	1 369.50	7 707.6	8.465	1700000
	2015		2,774,245	653.40	9 943.0	8.485	1878000
	2016		2,801,290	869.10	6 613.7	8.585	2095000
2017	2,947,871	1 061.10	10 829.8	8.755	2266722		

5	2008	Jambi	1,182,673	36.10	1 300.6	7.19	724000
	2009		1,272,520	40.50	213.9	7.213	800000
	2010		1,290,706	37.20	223.3	7.33	900000
	2011		1,473,686	19.50	2 134.9	7.47	1028000
	2012		1,497,081	156.30	1 445.7	7.68	1142500
	2013		1,545,061	34.30	2 799.6	7.79	1300000
	2014		1,531,064	51.40	908.0	7.905	1502300
	2015		1,646,180	107.70	3 540.2	7.95	1710000
	2016		1,617,177	61.00	3 884.4	8.065	1906650
	2017		1,726,578	76.80	3 006.6	8.145	2266722
6	2008	Nagara Selat	3,162,257	114.70	378.5	7.276	743000
	2009		3,195,765	56.80	580.3	7.294	824730
	2010		3,382,059	186.30	1 738.4	7.335	927825
	2011		3,562,010	557.30	1 068.9	7.36	1048440
	2012		3,737,693	786.40	2 930.6	7.495	1195220
	2013		3,737,623	485.90	3 396.0	8.46	1630000
	2014		3,867,671	1 056.50	7 042.8	7.525	1825000
	2015		3,815,643	645.80	10 944.1	7.655	1974346
	2016		3,894,181	2 793.50	8 534.1	7.77	2206000
	2017		4,083,217	1 182.90	8 200.2	7.83	2341500
7	2008	Bengkulu	802,963	13.00	22.675	7.59	690000
	2009		821,706	1.10	10.23	7.68	735000
	2010		842,828	25.10	8.5	7.75	780000
	2011		873,522	43.10	19.7	7.83	815000
	2012		910,129	30.40	52.6	8.01	930000
	2013		927,445	22.30	109.6	8.075	1200000
	2014		952,458	19.30	7.8	8.275	1350000
	2015		943,881	20.60	553.9	8.295	1500000
	2016		961,516	55.70	949.1	8.365	1605000
	2017		1,004,559	138.70	296.5	8.46	1730000
8	2008	Lampung	3,428,784	67.00	735.2	7.09	617000
	2009		3,507,395	32.70	549.9	7.19	691000
	2010		3,530,170	30.70	272.3	7.21	767500
	2011		3,670,828	79.50	824.4	7.225	855000
	2012		3,783,134	114.30	304.2	7.245	975000
	2013		3,768,192	46.80	1 325.3	7.31	1150000
	2014		3,824,233	156.50	3 495.7	7.465	1399037
	2015		3,921,187	257.70	1 102.3	7.555	1581000
	2016		3,854,815	85.70	6 031.8	7.63	1763000
	2017		4,082,131	120.60	7 014.8	7.785	1908447

9	2008	Bangka Belitung	472,369	1.70	2.0	6.66	813000
	2009		529,315	22.40	249.3	6.89	850000
	2010		527,392	22.00	0.4	7.05	910000
	2011		589,234	146.00	514.4	7.165	1024000
	2012		597,112	59.20	533.5	7.315	1110000
	2013		639,575	112.40	608.2	7.435	1630000
	2014		623,758	105.00	615.5	7.46	1825000
	2015		668,754	82.70	1 023.7	7.565	1974346
	2016		645,250	52.70	2 202.0	7.655	2206000
	2017		695,988	153.10	1 734.7	7.79	2538673
10	2008	Kepulauan Riau	597,159	161.40	74.4	9.1	833000
	2009		616,273	230.70	240.0	9.128	892000
	2010		653,012	165.70	166.9	9.38	925000
	2011		778,730	219.70	1 370.4	9.445	975000
	2012		812,463	537.10	43.5	9.5	1015000
	2013		848,009	315.70	417.7	9.56	1365087
	2014		845,088	392.10	28.5	9.56	1665000
	2015		814,427	640.40	612.1	9.61	1954000
	2016		830,438	6 789.08	492.5	9.665	2178710
	2017		985,619	1 031.50	1 398.0	9.785	2358454
11	2008	DKI Jakarta	4,054,976	9 927.60	1 837.3	10.233	972604
	2009		4,186,956	5 510.80	9 693.8	10.283	1069865
	2010		4,208,905	6 429.30	4 598.5	10.365	1118009
	2011		4,490,919	4 824.10	9 256.4	10.41	1290000
	2012		4,701,699	4 107.70	8 540.1	10.42	1529150
	2013		4,633,224	2 591.10	5 754.5	10.435	2200000
	2014		4,678,838	4 509.40	17 811.5	10.54	2441000
	2015		5,084,529	3 619.40	15 512.7	10.705	2700000
	2016		5,004,548	3 398.20	12 216.9	10.88	3100000
	2017		5,169,165	4 595.00	47 262.3	11.02	3355750
12	2008	Jawa Barat	16,164,835	2 552.20	4 289.5	7.11	568193
	2009		16,787,464	1 934.40	4 724.9	7.28	628191
	2010		17,182,807	1 692.00	15 799.8	7.39	671500
	2011		18,325,966	3 839.40	11 194.3	7.45	732000
	2012		18,402,134	4 210.70	11 384.0	7.515	780000
	2013		18,899,675	7 124.90	9 006.1	7.575	850000
	2014		19,443,783	6 562.00	18 726.9	7.705	1000000
	2015		20,456,889	5 738.70	26 272.9	7.855	1000000
	2016		20,277,112	5 470.90	30 360.2	7.945	1312355
	2017		20,722,338	5 142.90	38 390.6	8.14	1420624

13	2008	Jawa Tengah	16,106,028	135.60	1 336.3	6.69	547000
	2009		15,401,496	83.10	2 642.6	6.701	575000
	2010		15,956,034	59.10	795.4	6.73	660000
	2011		16,267,316	175.00	2 737.8	6.755	675000
	2012		16,402,481	241.50	5 797.1	6.785	765000
	2013		16,442,763	464.30	12 593.6	6.815	830000
	2014		16,750,975	463.40	13 601.6	6.935	910000
	2015		17,322,025	850.40	15 410.7	7.045	910000
	2016		17,162,053	1 030.80	24 070.4	7.165	1265000
	2017		17,443,572	2 372.50	19 866.0	7.285	1367000
14	2008	DIY	1,863,747	16.70	4.987	8.42	586000
	2009		1,925,630	8.10	32.9	8.48	700000
	2010		1,942,764	4.90	10.0	8.53	745694
	2011		1,863,550	2.40	1.6	8.555	808000
	2012		1,879,798	84.90	334.0	8.625	892660
	2013		1,878,495	29.60	283.8	8.75	947114
	2014		1,988,912	64.90	703.9	8.855	988500
	2015		2,012,626	89.10	362.4	9.02	988500
	2016		2,037,864	19.60	948.6	9.135	1237700
	2017		2,055,892	36.50	294.6	9.235	1337645
15	2008	Jawa Timur	18,861,360	457.10	2 778.3	6.342	500000
	2009		19,123,221	422.10	4 290.7	6.654	570000
	2010		19,611,540	1 769.20	8 084.1	6.755	630000
	2011		19,439,494	1 312.00	9 687.5	6.81	705000
	2012		19,190,841	2 298.80	21 520.3	6.87	745000
	2013		19,585,490	3 396.30	34 848.9	6.925	866250
	2014		19,885,389	1 802.50	38 132.0	7.07	1000000
	2015		19,800,394	2 593.40	35 489.8	7.16	1000000
	2016		19,648,665	1 941.00	46 331.6	7.25	1273490
	2017		20,034,299	1 566.70	45 044.5	7.355	1388000
16	2008	Banten	3,652,525	477.70	1 989.1	7.935	837000
	2009		3,792,825	1 412.00	4 381.7	7.85	917500
	2010		3,814,715	1 544.20	5 852.5	7.865	955300
	2011		4,487,139	2 171.70	4 298.6	7.935	1000000
	2012		4,858,492	2 716.30	5 117.5	8.1	1042000
	2013		4,983,694	3 720.20	4 008.7	8.155	1170000
	2014		4,938,093	2 034.60	8 081.3	8.18	1325000
	2015		5,208,123	2 542.00	10 709.9	8.26	1600000
	2016		5,234,274	2 912.10	12 426.3	8.36	1784000
	2017		5,506,955	3 047.50	15 141.9	8.525	1931180

17	2008	BALI	1,999,185	81.00	29.0	7.33	682650
	2009		2,000,453	227.20	50.8	7.543	760000
	2010		2,041,337	278.30	313.4	7.72	829316
	2011		2,227,272	482.10	313.4	7.78	890000
	2012		2,243,781	482.00	3 108.0	8.055	967500
	2013		2,329,825	390.90	2 984.7	8.085	1181000
	2014		2,377,394	427.10	252.8	8.12	1542600
	2015		2,425,173	495.80	1 250.4	8.255	1621172
	2016		2,332,064	450.60	482.3	8.365	1807600
	2017		2,437,494	886.90	592.5	8.55	1956727
18	2008	Nusa Tenggara Barat	1,965,602	14.40	56.784	5.22	730000
	2009		1,915,234	2.90	162.465	5.586	832500
	2010		2,003,781	220.50	1 805.8	5.79	890775
	2011		2,075,425	465.10	42.3	6.115	950000
	2012		2,097,483	635.80	45.4	6.38	1000000
	2013		2,167,987	488.20	1 398.0	6.46	1100000
	2014		2,211,421	551.10	212.5	6.72	1210000
	2015		2,290,853	699.40	347.8	6.765	1330000
	2016		2,295,441	439.00	1 342.8	6.835	1482950
	2017		2,423,450	132.10	5 413.5	6.95	1631245
19	2008	Nusa Tenggara Timur	2,129,110	1.40	0.3	6.29	650000
	2009		2,278,031	4.00	2.8	6.31	725000
	2010		2,304,772	3.80	0.1	6.44	800000
	2011		2,196,157	5.50	1.0	6.545	850000
	2012		2,236,957	8.70	14.4	6.635	925000
	2013		2,292,456	9.90	17.6	6.685	1010000
	2014		2,336,212	15.10	3.6	6.86	1150000
	2015		2,330,534	69.90	1 295.7	6.94	1250000
	2016		2,357,624	58.20	822.2	7.035	1425000
	2017		2,422,809	139.00	1 081.9	7.165	1525000
20	2008	Kalimantan Barat	2,025,118	39.80	248.1	6.198	645000
	2009		2,129,999	27.80	517.1	6.207	705000
	2010		2,152,247	170.40	1 171.7	6.265	741000
	2011		2,177,974	500.70	1 404.0	6.31	802500
	2012		2,254,813	397.50	2 811.0	6.61	900000
	2013		2,263,117	650.00	2 522.1	6.655	1060000
	2014		2,309,311	966.10	4 320.8	6.82	1380000
	2015		2,257,293	1 335.70	6 143.5	6.925	1560000
	2016		2,305,125	630.70	9 015.5	6.965	1739400
	2017		2,399,373	568.40	12 380.9	7.04	1882900

21	2008	Kalimantan Tengah	1,026,211	62.70	681.9	7.46	765868
	2009		1,031,818	4.90	1 464.2	7.492	873089
	2010		1,058,281	546.60	3 507.7	7.535	986590
	2011		1,108,222	543.70	3 376.0	7.575	1134580
	2012		1,154,236	524.70	4 529.6	7.675	1327459
	2013		1,186,076	481.60	1 835.3	7.775	1553127
	2014		1,213,985	951.00	980.4	7.805	1723970
	2015		1,247,624	933.60	1 270.1	8.01	1896367
	2016		1,238,677	408.20	8 179.1	8.11	2057558
	2017		1,327,871	641.00	3 037.8	8.265	227307
22	2008	Kalimantan Selatan	1,594,760	0.20	592.7	7.09	825000
	2009		1,635,177	171.80	870.9	7.17	930000
	2010		1,738,366	202.20	2 015.0	7.26	1024500
	2011		1,738,918	272.10	2 118.3	7.375	1126000
	2012		1,815,448	272.30	3 509.8	7.485	1225000
	2013		1,880,461	260.60	8 299.2	7.59	1337500
	2014		1,936,480	502.50	2 616.5	7.6	1620000
	2015		1,968,496	961.20	2 060.4	7.76	1870000
	2016		1,977,837	249.40	6 163.0	7.89	2085050
	2017		2,076,487	243.80	2 981.9	7.985	2258000
23	2008	Kalimantan Timur	1,106,982	12.60	298.7	8.42	889654
	2009		1,323,369	79.90	82.2	8.47	955000
	2010		1,374,563	1 092.20	7 881.3	8.53	1002000
	2011		1,526,079	602.40	6 569.1	8.755	1084000
	2012		1,641,089	2 014.10	5 889.3	8.905	1177000
	2013		1,696,738	1 335.4	16 034.6	8.97	1752073
	2014		1,752,916	2 145.70	12 859.0	9.005	1886315
	2015		1,530,591	2 381.40	9 611.3	9.125	2026126
	2016		1,504,133	1 139.60	6 885.1	9.215	2161253
	2017		1,535,296	1 285.20	10 980.2	9.34	2354800
24	2008	Sulawesi Utara	917,363	35.50	42.2	8.59	845000
	2009		962,627	57.70	49.5	8.62	929500
	2010		961,648	226.80	95.8	8.66	1000000
	2011		975,780	220.20	331.6	8.685	1050000
	2012		1,041,042	46.70	678.5	8.705	1250000
	2013		1,032,151	65.70	66.8	8.755	1550000
	2014		1,075,184	98.40	83.0	8.86	1900000
	2015		1,077,665	88.00	270.6	8.88	2150000
	2016		1,091,380	382.80	5 069.6	8.965	2400000
	2017		1,181,911	482.90	1 488.2	9.145	2598000

25	2008	Sulawesi Tengah	1,131,027	1.50	120.8	7.55	670000
	2009		1,173,089	3.30	119.7	7.623	720000
	2010		1,223,979	138.50	153.6	7.645	777500
	2011		1,305,496	370.40	2 620.2	7.685	827500
	2012		1,363,359	806.50	602.8	7.725	885000
	2013		1,353,939	855.00	605.3	7.775	995000
	2014		1,386,103	1 494.20	95.8	7.805	1250000
	2015		1,383,919	1 085.20	968.4	8.01	1500000
	2016		1,443,060	1 600.30	1 081.2	8.11	1670000
	2017		1,510,782	1 545.60	1 929.7	8.265	1807775
26	2008	Sulawesi selatan	2,933,093	27.90	1 105.2	7.22	740520
	2009		3,095,365	77.00	1 137.8	7.29	905000
	2010		3,276,523	441.80	3 212.3	7.32	1000000
	2011		3,427,195	89.60	3 986.3	7.355	1100000
	2012		3,462,554	582.60	2 318.9	7.395	1200000
	2013		3,487,440	462.80	921.0	7.59	1440000
	2014		3,464,719	280.90	4 949.6	7.6	1800000
	2015		3,537,559	233.30	9 215.3	7.76	2000000
	2016		3,581,957	372.50	3 334.6	7.89	2250000
	2017		3,801,407	712.80	1 969.4	7.985	2433625
27	2008	Sulawesi Tenggara	905,085	0.50	19.0	7.48	700000
	2009		933,029	3.60	10.8	7.53	770000
	2010		984,271	14.00	19.2	7.58	860000
	2011		1,024,473	17.00	59.0	7.685	930000
	2012		1,073,935	35.70	907.3	7.82	1032300
	2013		1,047,992	86.40	1 261.6	7.935	1125207
	2014		1,112,015	161.80	1 249.9	8.235	1400000
	2015		1,125,748	145.00	2 015.4	8.245	1652000
	2016		1,166,221	376.10	1 794.2	8.345	1850000
	2017		1,221,884	693.00	3 148.7	8.465	2002625
28	2008	Gorontalo	393,567	0.856	30.6	6.796	600000
	2009		439,460	1.33	44.0	6.814	675000
	2010		460,355	0.80	16.7	6.85	710000
	2011		443,349	12.50	11.8	6.885	762500
	2012		457,837	35.30	164.9	6.905	837500
	2013		470,497	25.70	84.4	6.93	1175000
	2014		507,939	4.10	45.1	6.96	1325000
	2015		517,687	6.90	94.3	7.05	1600000
	2016		541,549	12.70	2 202.5	7.115	1875000
	2017		568,539	41.30	888.4	7.27	2030000

29	2008	Sulawesi Barat	450,687	1.479	155.0	6.559	760500
	2009		490,434	0.776	76.5	6.613	909400
	2010		523,760	37.30	840.0	6.64	944200
	2011		582,272	5.60	218.6	6.655	1006000
	2012		571,661	0.20	228.6	6.765	1127000
	2013		584,286	2.50	685.1	7.82	1165000
	2014		591,117	16.30	690.1	7.89	1400000
	2015		636,010	2.00	1 103.8	7.965	1655500
	2016		624,108	20.60	84.1	8.11	1864000
	2017		622,641	11.40	660.2	8.28	2017780
30	2008	Maluku	493,117	5.963	4.2	8.588	700000
	2009		528,509	11.9	1.9	8.614	775000
	2010		567,902	2.90	0.9	8.65	840000
	2011		646,155	11.70	0.1	8.7	900000
	2012		639,730	8.50	3.4	8.75	975000
	2013		669,115	52.80	14.0	8.815	1275000
	2014		680,075	13.10	11.1	9.16	1415000
	2015		663,261	82.40	0.8	9.165	1650000
	2016		682,173	102.60	11.4	9.275	1775000
	2017		709,363	212.00	52.3	9.4	1925000
31	2008	Maluku Utara	388,113	6.13	9.6	7.799	700000
	2009		411,538	5.90	14.8	7.812	770000
	2010		396,715	246.00	10.3	7.84	847000
	2011		456,278	129.80	13.5	7.885	889350
	2012		449,633	90.30	320.5	8.035	960498
	2013		463,048	268.50	1 114.9	8.265	1200622
	2014		465,486	98.70	156.3	8.33	1440746
	2015		490,152	203.80	48.2	8.355	1577617
	2016		512,511	438.90	8.8	8.525	1681266
	2017		530,271	228.10	1 150.6	8.61	1975000
32	2008	Papua Barat	312,205	0.90	23.1	7.662	1105500
	2009		332,796	1.00	15.8	7.69	1180000
	2010		339,195	17.20	51.3	7.775	1210000
	2011		355,264	33.10	47.2	7.83	1410000
	2012		361,510	32.00	45.8	7.92	1450000
	2013		362,348	54.20	304.0	8.05	1720000
	2014		392,634	153.40	100.0	8.185	1870000
	2015		389,033	258.60	63.4	8.25	2015000
	2016		411,692	514.50	10.6	8.305	2237000
	2017		408,517	84.70	59.2	8.395	2421500

33	2008	Papua	1,002,492	17.80	294.7	5.487	1105500
	2009		1,044,927	1.80	41.0	5.49	1216100
	2010		1,118,779	329.60	178.0	5.53	1316500
	2011		1,502,918	1 312.00	1 378.9	5.54	1403000
	2012		1,515,646	1 202.40	54.7	5.605	1585000
	2013		1,582,700	2 360.00	584.3	5.64	1710000
	2014		1,630,219	1 260.60	249.9	5.725	2040000
	2015		1,646,057	897.00	1 275.2	5.935	2193000
	2016		1,691,432	1 168.40	220.5	6.11	2435000
	2017		1,684,389	1 924.10	1 217.9	6.23	2663646